

KATA PENGANTAR



Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2017 ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Disperindag menuju good governance dengan mengacu pada Renstra Dinas Perindag Tahun 2016-2021. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengacu pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2017 menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LAKIP menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LAKIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik

Sebagai gambaran keberhasilan dan ketidaktercapaian misi dan tujuan organisasi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama periode tahun 2017 maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu. Diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan, khususnya bagi semua unit kerja yang ada untuk meningkatkan kinerjanya masing-masing di masa yang akan datang.

Bengkulu, Februari 2018

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI BENGKULU



H. LIERWAN, SE

Pembina Utama Madya (IV/d)

Nip. 19610420 198512 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu merupakan instansi Pemerintah Daerah yang diberikan tugas, bertanggung jawab dan amanah untuk melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan dibidang industri dan perdagangan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMD Provinsi Bengkulu 2016-2021, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu 2016-2021, Rencana Kerja dan Penetapan/Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2017.

Peran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dalam pembangunan ekonomi Bengkulu adalah meningkatkan daya saing industri dan peningkatan perdagangan dalam rangka menopang pertumbuhan ekonomi Bengkulu. Dalam Struktur perekonomian Provinsi Bengkulu 2017, sektor perdagangan berada diposisi kedua (14.59 persen) setelah pertanian, kehutanan dan perikanan (28,87 persen); perdagangan besar dan eceran (14,59 persen) diikuti administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (9,98) persen. Sektor perdagangan menjadi salah satu lapangan usaha utama dalam perekonomian Bengkulu. Sementara itu, sektor perindustrian berada di posisi keenam sebagai salah satu sektor penggerak ekonomi Bengkulu (6.17 persen). Artinya bahwa sektor perdagangan dan industry berperan sebagai motor penggerak ekonomi utama perekonomian Bengkulu (20.76 persen).

Sebagai Instansi yang bertugas membina dan mengembangkan sektor industri dan perdagangan telah mampumenjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017, secara umum sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan, walaupun masih terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama yang belum dapat mencapai target yang ditetapkan.

TUJUAN 1 Peningkatan populasi dan persebaran industry	Mendapat predikat dengan capaian rata-rata pada kategori Baik dengan rata – rata persentase capaian 85.08 persen. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran 2 (dua) sasaran yang diukur melalui 4 (empat) indikator, menghasilkan 2 (dua) indikator dengan kategori sangat baik, 1 indikator dengan kategori baik dan 1 (satu) indikator dengan kategori cukup.
TUJUAN 2	Mendapat predikat dengan capaian rata-rata pada kategori

Meningkatnya kelancaran dan stabilitas sistem distribusi, pengamanan pasar dalam negeri dan perlindungan konsumen

Sangat Baik dengan rata – rata persentase capaian 105.75 persen. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran 1 (satu) sasaran yang diukur melalui 2 (dua) indikator, dengan kategori sangat baik.

TUJUAN 3
Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor

Mendapat predikat dengan capaian rata-rata pada kategori Sangat Baik dengan rata – rata persentase capaian 720.03 persen. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran 1 (satu) sasaran yang diukur melalui 3 (tiga) indikator, dengan kategori sangat baik.

TUJUAN 4
Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Mendapat predikat dengan capaian rata-rata pada kategori Sangat Baik dengan rata – rata persentase capaian 100 persen. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran 1 (satu) sasaran yang diukur melalui 2 (dua) indikator, dengan kategori sangat baik

Secara keseluruhan Pencapaian kinerja sektor industri dan perdagangan menunjukkan trend perkembangan yang baik, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi sektor industri dan perdagangan sebagaimana tercermin pada beberapa indikator kinerja utama yang belum tercapai sesuai target, antara lain :

1. Persentase Pertumbuhan Industri Per tahun
2. Persentase peningkatan tenaga kerja industri

Disamping permasalahan tersebut sektor industri Bengkulu masih menghadapi masalah klasik seperti :

1. Masih minimnya hilirisasi industry berbasis sumber daya alam akibat keterbatasan SDM, Teknologi, Infrastruktur dan Permodala.
2. Ketergantungan pada bahan baku impor;
3. Keterbatasan sarana dan prasarana serta Penguasaan teknologi Industri serta Minimnya akses permodalan, perijinan, pemasaran;
4. Penerapan standarisasi produk, HKI dan sistem mutu masih kurang;
5. Hight Cost Economic yang disebabkan oleh regulasi yang kurang menguntungkan Industri Dalam Negeri seperti ketidakpastian hukum, pungli dan pajak ekspor.
6. Infrastruktur belum memadai, Kenaikan Upah Buruh (UMK), kenaikan TDL, ketidakpastian pasokan energi;
7. Beban biaya bahan baku menjadi pendorong utama kenaikan total biaya produksi industri pengolahan.
8. Kenaikan biaya bahan baku terutama didorong oleh pelemahan nilai Rupiah Terhadap US Dollar.

Sedangkan persoalan yang terkait dengan perdagangan antara lain seperti:

1. Belum efisiennya sistem logistik dan konektivitas antar daerah.
2. Belum optimalnya intensitas perdagangan antar daerah karena belum tersedianya informasi pasar antar daerah.
3. Belum stabilnya harga produk agro dikarenakan panjangnya mata rantai distribusi perdagangan.
4. Perdagangan bebas mengakibatkan membanjirnya barang barang impor yang masuk dan produk dumping ke Indonesia khususnya Bengkulu;
5. Masih lemahnya pengawasan dan pengendalian produk impor serta safeguard yang jarang digunakan;
6. Pola piki konsumen yang lebih cenderung ke produk impor;
7. Masih kurangnya diversifikasi tujuan ekspor;
8. Kurangnya Ketersediaan akses data produk dan negara tujuan ekspor;

Dalam mencapai indikator kinerja utama dari masing – masing sasaran strategis tersebut diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Bengkulu pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran APBD sebesar Rp. 17.722.210.784,01, Realisasinya sebesar Rp. 15.200.490.058,- (85.77%), dengan rincian sbb :

- a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 9.492.993.784,01,- terealisasi sebesar Rp. 8.528.445.585,- (89.84%). Sisanya sebesar Rp. 3.545.969.646,- (5,96%);
- b. Belanja Langsung sebesar Rp. 8.229.217.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.672.044.473,- (81.08%) Sisanya sebesar Rp. 9.390.148.238,- (6,81%), dengan rincian sbb:
 - Belanja Pegawai Pagu sebesar Rp. 638.255.000,- Realisasi sebesar Rp. 369.534.250,- (95,12%) Sisanya sebesar Rp. 817.911.500,- (19,16%)
 - Belanja Barang dan Jasa, Pagu sebesar Rp. 6.587.762.000,- Realisasi sebesar Rp. 5.313.613.543,- (92,75%) Sisanya sebesar Rp.7.848.589.830,- (20,48%).
 - Belanja Modal, Pagu sebesar Rp. 1.003.200.000,- Realisasi sebesar Rp. 988.896.680,- (93,32%) Sisanya sebesar Rp. 861.538.924,- (21,35%).

Dalam menjalankan urusan pusat dibidang perindustrian dan perdagangan di daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu mendapatkan dana alokasi APBN Tahun Anggaran 2017 (Dekonsentrasi) sebesar Rp. 3.948.427.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.559.794.900,- (Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau sebesar 90.16 persen. Dengan Sisa lebih pelaksanaan anggaran (SILPA) sebesar Rp. 388.632.100,- (Tiga Ratus

Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah) atau sebesar 9.84 persen.

Dengan memperhatikan hasil capaian pada tahun 2017, Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

ASPEK KELEMBAGAAN:

1. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual dibidang industri dan perdagangan.
2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target kinerja yang sudah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu akan ditingkatkan untuk secara pro aktif. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
3. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota akan dilakukan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indicator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan instansi di Provinsi maupun di Kabupaten/ Kota dan dunia usaha.
4. Agar implementasi sistem AKIP benar-benar efektif, perlu segera direalisasikan sinergisitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan ,sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan out put maupun out come kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergisitas tersebut, kinerja organisasi yang dibiayai melalui dana APBD benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.
5. Menjadikan SAKIP ukuran kinerja organisasi secara nyata dan akuntabel, dengan menerapkan fungsi reward and punishment yang tegas dan ketat.

ASPEK URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1. Pembangunan industri-industri pendukung yang mengolah bahan baku dalam kuantitas, kualitas dan harga yang bersaing.
2. Pemetaan dan pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dari daerah lain di luar Bengkulu sebagai alternatif pengganti barang barang impor (substitusi impor).
3. Memacu pertumbuhan industry menggunakan bahan baku lokal guna menekan impor dan mencegah defisit neraca perdagangan serta bersinergi dgn stakeholders dalam menyukseskan program hilirisasi industri yang tengah diupayakan pemerintah utamanya produk agro.
4. Melakukan pembinaan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah secara berkelanjutan.
5. Membuka akses pasar IKM yang lebih luas melalui pemanfaatan digital marketing guna mendorong IKM dengan produk berorientasi ekspor.
6. Mendorong pengembangan industri kreatif daerah berbasis kearifan lokal guna mendorong kreatifitas IKM dan menambah nilai tambah produk daerah.
7. Menyelesaikan segera permasalahan yang menghambat daya saing industri manufaktur seperti infrastruktur, regulasi yang membuat hight cost economic, Upah Buruh, kenaikan TDL, dll.
8. Membuat standarisasi/SNI diberlakukan dengan ketat/law enforcement harus ditegakkan serta Perusahaan yang tingkat kandungan dalam negerinya tinggi harus diberi apresiasi/insentif;
9. Ketersediaan informasi dan kebijakan impor yang kondusif dalam rangka pengendalian impor serta memperketat pengawasan impor di Bengkulu.
10. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan Atase Perdagangan, ITPC diluar negeri dan KADINDA Bengkulu untuk menawarkan kepada investor/perusahaan asing untuk berinvestasi di Bengkulu..

Bengkulu, Februari 2018

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI BENGKULU



H. LIERWAN, SE

Pembina Utama Madya (IV/d)

Nip. 19610420 198512 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GRAFIK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Gambaran Umum	4
1.4.1 Tugas Pokok	4
1.4.1.2 Fungsi	4
1.4.3 Struktur Organisasi	4
1.5 Peran Strategis	7
1.6 Kekuatan Sumber Daya yang ada	7
1.7 Sistematika Penulisan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Rencana Strategis	11
2.2 Rencana Kerja	14
2.3 Penetapan Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2017	19
3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2017	21
3.2.1 Sasaran Strategis Kesatu	21
3.2.1.1 Indikator Kinerja Utama “Persentase Pertumbuhan Industri Per Tahun ..	24
3.2.1.2 Indikator Kinerja Utama “Kontribusi Sektor Industri terhadap PRDB	25
3.2.2 Sasaran Strategis Kedua	26
3.2.2.1 Indikator Kinerja Utama “Nilai Investasi Sektor Industri”	29
3.2.2.2 Indikator Kinerja Utama “Persentase Peningkatan Tenaga Kerja	29
3.2.3 Sasaran Strategis Ketiga	35
3.2.3.1 Indikator Kinerja Utama “Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan	39
3.2.3.2 Indikator Kinerja Utama “Kontribusi Sektor Perdagangan Pada PRDB ..	40
3.2.4 Sasaran Strategis Keempat	43
3.2.4.1 Indikator Kinerja Utama “Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	46

3.2.4.2	Indikator Kinerja Utama “Nilai Ekspor”	48
3.2.4.3	Indikator Kinerja Utama “Persentase Penurunan Nilai Impor”	49
3.2.5	Sasaran Strategis Kelima	52
3.2.5.1	Indikator Kinerja Utama “Nilai SAKIP”	55
3.2.5.2	Indikator Kinerja Utama “Nilai LPPD”	56
3.3	Akuntabilitas Keuangan Tahun 2017	57
3.3.1	Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017	57
3.3.2	Realisasi APBD Tahun 2017	58
3.3.3	Realisasi APBN Tahun 2017	59
BAB IV	PENUTUP.....	60
4.1	Kesimpulan	60
4.2	Permasalahan dan Kendala	61
4.3	Rekomendasi	62
LAMPIRAN – LAMPIRAN	64

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

No	Nama Tabel	Hal
Tabel 1.1	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu	8
Tabel 1.2	Kondisi sarana dan prasarana di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu pada tahun 2017	9
Tabel 2.1	Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan dan Pengembangan INDAG Tahun 2016-2021	17
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2017	18
Tabel 3.1	Tingkat Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Bengkulu Tahun 2017	19
Tabel 3.2	SASARAN STRATEGIS 1 Tingkat Capaian Kinerja tahun 2013-2017	22
Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2017	22
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1	22
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD	22
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional	23
Tabel 3.7	Alokasi Per Sasaran Pembangunan	23
Tabel 3.8	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	23
Tabel 3.9	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	23
Tabel 3.10	SASARAN STRATEGIS 2 Tingkat Capaian Kinerja tahun 2013-2017	26
Tabel 3.11	Pencapaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2017	27
Tabel 3.12	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2	27
Tabel 3.13	Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD	27
Tabel 3.14	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional	28
Tabel 3.15	Alokasi Per Sasaran Pembangunan	28
Tabel 3.16	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	28
Tabel 3.17	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	29
Tabel 3.18	SASARAN STRATEGIS 3 Tingkat Capaian Kinerja tahun 2013-2017	36
Tabel 3.19	Pencapaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2017	36
Tabel 3.20	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3	36
Tabel 3.21	Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD	37
Tabel 3.22	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional	37
Tabel 3.23	Alokasi Per Sasaran Pembangunan	38
Tabel 3.24	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	38
Tabel 3.25	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	38
Tabel 3.26	SASARAN STRATEGIS 4 Tingkat Capaian Kinerja tahun 2013-2017	43
Tabel 3.27	Pencapaian Kinerja Sasaran 4 Tahun 2017	44
Tabel 3.28	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 4	44

Tabel 3.29	Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD	44
Tabel 3.30	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional	44
Tabel 3.31	Alokasi Per Sasaran Pembangunan	45
Tabel 3.32	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	45
Tabel 3.33	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	45
Tabel 3.34	Kontribusi Ekspor Impor Non Migas Bengkulu Terhadap Ekspor Impor Non Migas Nasional (Tahun 2013 - 2017)	49
Tabel 3.35	Pencapaian Kinerja Sasaran 5 Tahun 2017	53
Tabel 3.36	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 5	53
Tabel 3.37	Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD	53
Tabel 3.38	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional	54
Tabel 3.39	Alokasi Per Sasaran Pembangunan	54
Tabel 3.40	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	55
Tabel 3.41	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	55
Tabel 3.42	Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017	57
Tabel 3.43	Realisasi Anggaran APBD Per Program Tahun 2017	58
Tabel 3.44	Realisasi APBN Tahun 2017	59



DAFTAR GRAFIK

No	Nama Grafik	Hal
Grafik 3.1	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Bengkulu Dan Pertumbuhan Industri Pengolahan Nasional (Non Migas) Tahun 2013 – 2017	24
Grafik 3.2	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Bengkulu Tahun Nasional Tahun 2013 – 2017 (Dalam Trilyun)	25
Grafik 3.3	Perkembangan Unit Usaha Industri di Provinsi Bengkulu 2013-2017	30
Grafik 3.4	Perkembangan Tenaga Kerja Sektor Industri Provinsi Bengkulu Tahun 2013- 2017	30
Grafik 3.5	Perkembangan Nilai Investasi Sektor Industri Provinsi Bengkulu Tahun 2013 - 2017	31
Grafik 3.6	Perkembangan Nilai Produksi Sektor Industri Provinsi Bengkulu Tahun 2013 - 2017	31
Grafik 3.7	Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan antara Bengkulu dibandingkan terhadap nasional Tahun 2013-2017	39
Grafik 3.8	Nilai Sektor Perdagangan Bengkulu Terhadap Nasional	40
Grafik 3.9	Persentase Kontribusi Sub Sektor Perdagangan Provinsi Bengkulu terhadap PRDB	40
Grafik. 3.10	Nilai Bersih Perdagangan Luar Negeri Provinsi Bengkulu (2013-2017)	48
Grafik. 3.11	Nilai Impor Provinsi Bengkulu (2013-2017)	50

PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu yang mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu membangun dan mengembangkan bidang industri dan perdagangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKJ).

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2017 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Dinas Perindag dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Disperindag. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);
 12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
 15. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Daerah Provinsi Bengkulu;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 – 2021.
 17. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu

Nomor : 800/1453.b/PERINDAG/01/I/2017 Tanggal 13 Oktober 2017 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu

1.3 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu selama Tahun 2017.

Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.4 Gambaran Umum

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 sebagai berikut :

1.4.1 Tugas Pokok

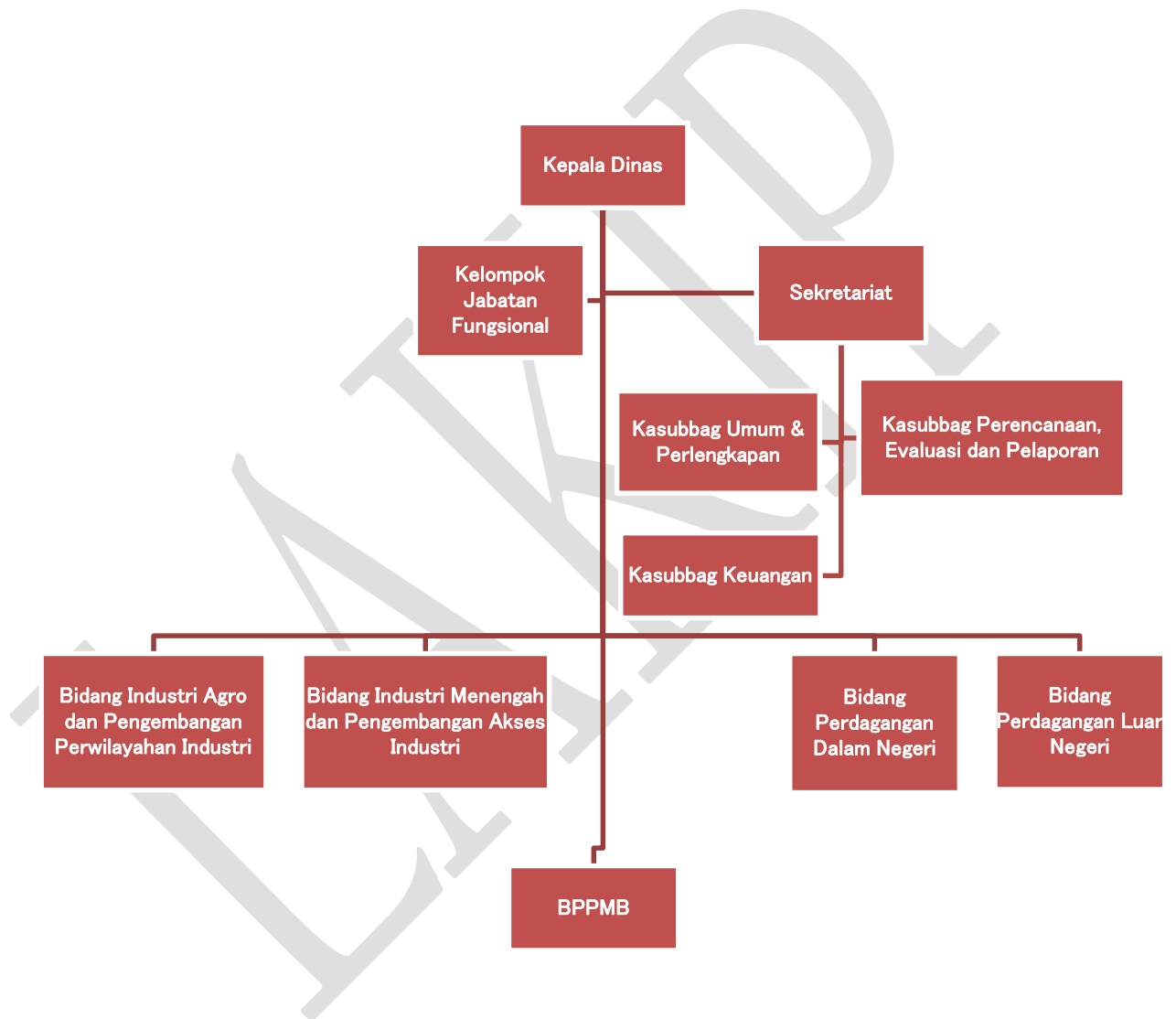
1.4.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu memiliki fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan.
- b) Pengelolaan dan fasilitasi dibidang perindustrian dan perdagangan.
- c) Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- d) Pemberian perizinan dan pelayanan umum lintas kabupaten/kota.
- e) Pelaksanaan ketatausahaan dinas.
- f) Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
- g) Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang perindustrian dan perdagangan

1.4.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, terdiri dari 1 (satu) Eselon II, 6 (enam) Eselon III yang terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4 Bidang Teknis serta 1 (satu) UPTD, 18 (delapan belas) Eselon IV dan Kelompok Fungsional. Adapun Bagan Organisasi adalah sebagai berikut:



Tugas pokok masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 52 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016, adalah sebagai berikut :

- a) Sekretariat, dengan tugas“mengarahkan program kerja, Mengelola urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi, Mengkoordinasikan pengidentifikasian produk hukum daerah serta menginventarisir permasalahan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- b) Bidang Industri Agro dan Pengembangan Perwilayahan Industri dengan tugas“Penyiapan koordinasi, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan industri provinsi, penyebaran dan pembangunan industri, penanaman modal di bidang industry, Pengelolaan sistem informasi industry, Penyiapan koordinasi dan fasilitasi penerbitan izin usaha industri kecil dan izin usaha industri menengah, izin usaha kawasan industri yang lokasinya di daerah kawasan industri di wilayah kabupaten/kota, Pengawasan dan pengendalian usaha industri besar dan usaha kawasan industri di wilayah kabupaten/kota”.
- c) Bidang Industri Menengah dan Pengembangan Akses Industri dengan tugas“Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi pembangunan sumber daya manusia industri, penjaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri dalam negeri, pengembangan dan pemanfaatan, kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri di wilayah kabupaten/kota, serta penyediaan pembiayaan yang kompetitif dan pemberian fasilitas di wilayah.”
- d) Bidang Perdagangan Dalam Negeri dengan tugas “Melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan penyiapan koordinasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan, Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi, Mengkoordinasikan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah, Memimpin pelaksanaan operasi pasar, Memantau pelaksanaan pendistribusian dan stok pupuk bersubsidi bersama komisi pengawas pupuk pestisida provinsi, produsen dan distributor serta membuat laporan hasil pemantauan, Melaksanakan promosi dagang produk unggulan yang berasal dari kabupaten/kota, Menyelenggarakan pengawasan barang beredar dan melakukan penegakan hukum dibidang perlindungan konsumen”.
- e) Bidang Perdagangan Luar Negeri dengan tugas “Melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan tugas, Penyiapan bimbingan teknis pembinaan dunia usah di bidang ekspor impor, Meningkatkan pengawasan mutu perizinan dan rekomendasi dibidang ekspor impor, Menganalisa iklim usaha dan pemantauan komoditi dibidang ekspor, Meningkatkan kerjasama dengan bidang usaha dibidang ekspor, impor, Melaksanakan pendataan komoditi potensial di bidang ekspor”.
- f) UPTD Badan Penelitian dan Pengujian Mutu Barang (BPPMB).

- g) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan secara professional, Kelompok jabatan fungsional dapat melakukan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Tenaga fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan, Seorang tenaga fungsional dipim pin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara fungsional yang ada dilingkungan dinas, Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5 Peran Strategis

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai peran yang strategis yaitu pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan sebagaimana tercermin dalam PERDA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan di bidang industri dan perdagangan. Dilakukan secara lebih aplikatif, antara lain :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan dibidang perindustrian dan perdagangan;
2. Meningkatkan daya saing industri di Provinsi Bengkulu melalui:
 - Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
 - Peningkatan Nilai Tambah Industri Berbasis Sumber Daya Alam;
 - Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri;
 - Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
 - Peningkatan Standarisasi Industri;
 - Peningkatan Industri Berbasis Sumber Daya Alam).
3. Meningkatkan ekspor non-migas dan pengendalian impor;
4. Meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri dalam kaitannya dengan menciptakan stabilitas harga pokok dan pengendalian inflasi, memberdayakan komoditi agro melalui pelaksanaan pasar lelang komoditi agro.
5. Meningkatkan perlindungan konsumen dalam kaitannya dengan tertib niaga dan perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar ilegal, sertifikasi mutu barang.

Peran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga tercermin dalam agenda / prioritas pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 yaitu Peningkatan sektor industry dan meningkatkan net ekspor perdagangan dalam & luar negeri.

1.6 Kekuatan Sumber Daya yang ada

Sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 keadaan pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut:

LAKIP

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu

No	Kualifikasi Pendidikan	Jml	Golongan I				Golongan II				Golongan III				Golongan IV				Jabatan Eselon						
			a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	Pejabat Struktural						Pejabat Fungsional
																			II		III		IV		
																			a	b	a	b	a	b	
1	SD	1		1																					
2	SLTP	2					1	1																	
3	SLTA	18					3	3			7	1	4												
4	D.1	-																						5	
5	D.2	-																							
6	D.3	3							1				2												
7	S.1	61								12	18	7	16	5	1	1	1	1	1		4		13		10
8	S.2	8										1	3	2		2					2		3		1
9	S.3	-																							
Jumlah		93		1				4	4	1	12	26	13	22	5	3	1	1	1	1		6		16	16

1.7 Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	SARANA	KONDISI		JUMLAH			PRASARANA	KONDISI		JUMLAH			KET
		BAIK	RUSAK	LENGKAP	MENCUKUPI	KURANG		BAIK	RUSAK	LENGKAP	MENCUKUPI	KURANG	
1	Mobil	4	2			v	Gedung Kantor	4	0		v	-	
2	Motor	3	15			v	Rumah Dinas	1	4		v	-	
3							Kebun/ Tempat Kerajinan	2	0		v	-	
4							Meja	118	5		-	v	
5							Kursi	102	4		-	v	
6							Kursi Lipat	4	0		-	v	
7							Kursi Putar	50	25		-	v	
8							Kursi Tamu	13	0		-	v	
9							Komputer	24	10		-	v	
10							Printer	25	20		-	v	
11							Laptop/ Notebook	14	1		-	v	
12							Air Conditioner	23	0		-	v	
13							Lemari	7	0		-	v	
14							Filling Cabinet	13	0		-	v	
15							Infocus/Proyektor	2	4		-	v	

16							Peralatan Laboratorium	31	0		-	v	
17							Peralatan Kantor Lainnya	28	1		-	v	

LAKIP

1.8 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. Ikhtisar Eksekutif.

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah yang diambil, serta langkah antisipatifnya.

b. Bab I. Pendahuluan

Bagian ini menguraikan latar belakang, landasan hukum, tujuan, peran strategis, kekuatan sumber daya, tugas, fungsi dan struktur organisasi, peran strategis, kekuatan sumber daya serta sistematika laporan.

c. Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.

Bagian ini menguraikan tentang Rencana Strategis dan Penetapan / Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2017.

d. Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang pengukuran, sasaran dan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov.Bengkulu Tahun 2017.

e. Bab IV. Penutup

Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Agenda pembangunan bidang ekonomi sebagaimana tertuang pada misi kedua dan keempat dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 adalah “Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial dan layanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan serta perekonomian rakyat berbasis keunggulan local” dan “Mewujudkan pola pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan”. Dengan tujuan yang terkait langsung dengan Dinas Perindag Prov. Bengkulu, antara lain (1) Meningkatkan net ekspor perdagangan dalam & luar negeri; (2) Meningkatkan percepatan kinerja sektor industri.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dan Perdagangan. Dalam kurun waktu 2016-2021 dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dan memperhitungkan potensi, peluang, serta kendala yang ada maupun tantangan yang mungkin terjadi.

Dalam rangka mendukung misi dan tujuan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 tersebut, maka Kepala Dinas telah menetapkan Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, yaitu menjadikan “*Terwujudnya Bengkulu yang Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan Struktur Industri dan Perdagangan yang Kuat dan Berkeadilan*”.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Produktivitas, Daya Saing dan Kemandirian Industri berbasis unggulan daerah yang sistematis, berkelanjutan dan terintegrasi
2. Meningkatkan peran perdagangan sebagai sektor penggerak yang kuat dalam perekonomian daerah
3. Meningkatkan Layanan Prima kepada Masyarakat melalui Kinerja Organisasi yang efektif dan Aparatur profesional

Dalam rangka implementasi atau penjabaran dari misi, ditetapkan tujuan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu, yaitu satu sampai lima tahun kedepan dalam tahun 2016-2021, serta menggambarkan arah strategis organisasi, perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi, serta meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan populasi dan persebaran industri
2. Penguatan daya saing dan produktivitas sektor industri
3. Terjaganya ketersediaan dan harga bahan pokok dan barang penting dan penyerapan produksi dalam negeri
4. Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor
5. Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyusun sasaran strategis. Sasaran Strategis Dinas Perindag untuk tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan 1 (satu) Peningkatan populasi dan persebaran industri. Sasaran yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Populasi Industri dan Persebaran Industri yang diukur dari Indikator Kinerja Utama : (1) Persentase Pertumbuhan Industri Per tahun dan (2) Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Provinsi Bengkulu;
2. Tujuan 2 (dua) Penguatan daya saing dan produktivitas sektor industri. Sasaran yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya Penguatan Struktur Industri dan Peningkatan Produktivitas Usaha Industri yang diukur dari Indikator Kinerja Utama : (1) Nilai Investasi Sektor Industri dan (2) Persentase peningkatan tenaga kerja industri;
3. Tujuan 3 (tiga) Terjaganya ketersediaan dan harga bahan pokok dan barang penting dan penyerapan produksi dalam negeri. Sasaran yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Perdagangan Dalam Negeri yang diukur dari Indikator kinerja Utama : (1) Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri dan (2) Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB Provinsi Bengkulu;
4. Tujuan 4 (empat) Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor. Sasaran yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya Ekspor Daerah dan menurunnya impor yang diukur dari Indikator Kinerja Utama : (1) Persentase Peningkatan nilai Ekspor, Nilai Ekspor dan (2) Persentase penurunan nilai impor;
5. Tujuan 5 (lima) Peningkatan Kualitas Kelembagaan. Sasaran yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan melalui Sistem tatakelola keuangan yang transparan dan akuntabel yang diukur dari Indikator Kinerja Utama : (1) Nilai SAKIP dan (2) Nilai LPPD

- b. Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran yang sesuai SOP dan Berbasis Teknologi Informasi yang diukur dari *Indikator Kinerja Utama* (1) Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran sesuai SOP dan (2) penerapan E-Government.

Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan diatas akan dicapai melalui 13 (tiga belas) program yang dilaksanakan oleh masing-masing unit eselon III sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun ketiga belas program tersebut adalah :

Program Prioritas yang meliputi:

- 1. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri**

Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan industri dalam menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dalam uji komersialisasi hasil penelitian, dan pengembangan rancangan produk baru, maupun proses produksi serta pemanfaatan sumber daya lokal.

- 2. Program Pengembangan Sentra - Sentra Industri Potensial**

- 3. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**

Program ini bertujuan untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan IKM, meningkatkan nilai tambah produk, menumbuhkan populasi IKM, memanfaatkan sumber daya termasuk SDA kabupaten / kota secara optimal, mengembangkan OVOP, mengembangkan industri kreatif, meningkatkan daya saing industri industri kecil dan menengah, meningkatkan nilai tambah sepanjang rantai nilai komoditi

- 4. Program Pengembangan Industri Agro**

Program ini bertujuan memperkuat basis produksi untuk meningkatkan nilai tambah sektor industri yang berbasis sumber daya alam hasil pertanian perkebunan;

- 5. Program Penataan Struktur Industri**

Program ini bertujuan mendorong terciptanya struktur industri yang kuat antara industri hilir dan hulu dan meningkatkan penyediaan Kawasan Industri di provinsi Bengkulu serta penataan tata ruang.

- 6. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**

Program ini bertujuan memberdayakan konsumen, penguatan lembaga perlindungan konsumen, dan peningkatan kapasitas kelembagaan balai penelitian

dan pengujian mutu barang, serta optimalisasi pengawasan barang beredar terutama terhadap barang-barang strategis, obat dan makanan.

7. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Program ini bertujuan meningkatkan daya saing global produk Provinsi Bengkulu, serta meningkatkan peran ekspor barang dan jasa dalam rangka meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, serta perluasan lapangan kerja

8. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program ini bertujuan meningkatkan efisiensi distribusi perdagangan, sarana dan prasarana penunjang perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing produk Provinsi Bengkulu

9. Program Persaingan Usaha

Program Penunjang yang meliputi:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam bidang penyediaan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana yang diperlukan Dinas Perindag dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan nyaman bagi para pemangku kepentingan. Sebagai indikator pencapaiannya tersedianya sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan.

3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan

2.2 Rencana Kerja

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok dan kegiatan pendukung (sub kegiatan) untuk mencapai

sasaran hasil program induknya, dan dirinci menurut sasaran output dan outcome pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya. Rincian Program/Kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air & Listrik
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Penyediaan ATK
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU an
8. Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
9. Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran
10. Publikasi Media Cetak dan Elektronik

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
6. Penyusunan DED Gedung Dekranasda dan Gedung Kantor
7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8. Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Koordinasi Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Urusan Perindag
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

1. Pengawasan Barang Berbahaya (B2)
2. Pengawasan Terpadu Penggunaan Bahan Berbahaya (B2)
3. Pendanaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

1. Peningkatan Kapasitas Lab Penguji Mutu Barang Eksport dan Impor
2. Pendataan dan Monitoring Produk Unggulan Provinsi Bengkulu

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

1. Penyusunan Profil Pasar
2. Pembuatan FS dan Master Plan Revitalisasi Pasar Tradisional
3. Fasilitasi Pasar Murah Provinsi Bengkulu

Program Pengembangan Sentra - Sentra Industri Potensial

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Bagi IKM Unggulan di Sentra Industri
2. Pembinaan dan Fasilitasi Industri Kecil Menengah (IKM) dalam pengembangan Dekranasda Provinsi Bengkulu
3. Pembentukan Forum Koordinasi OVOP Provinsi
4. Pemberdayaan IKM dan UKM Kampung Nelayan
5. Pengembangan Diversifikasi Produk Unggulan

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

1. Bantuan Sarana dan Prasarana Bagi IKM (Kampung Nelayan)

Program Pengembangan Industri Agro

1. Penyusunan Direktori Perusahaan Binaan Industri Agro
2. Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Industri Agro
3. Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Perindag
4. Penyusunan Perda Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bengkulu

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

1. *Promosi dan Fasilitasi Produk Unggulan Daerah Provinsi Bengkulu*
2. *Pengadaan Kemasan Susu*
3. *Konfrensi Kopi Daerah*
4. *Lomba Inovasi Khas Daerah*

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan Monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis. Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2016 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Matriks Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan memuat 4 (empat) sasaran strategis. Keempat sasaran strategis tersebut sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Populasi Industri dan Persebaran Industri yang diukur dari Persentase Pertumbuhan Industri Per tahun dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Provinsi Bengkulu;
2. Meningkatnya Penguatan Struktur Industri dan Peningkatan Produktivitas Usaha Industri yang diukur dari Nilai Investasi Sektor Industri dan Persentase peningkatan tenaga kerja industri.

3. Meningkatnya Pertumbuhan Perdagangan Dalam Negeri yang diukur dari Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri dan Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB Provinsi Bengkulu.
4. Meningkatnya Ekspor Daerah dan menurunnya impor yang diukur dari Persentase Peningkatan nilai Ekspor, Nilai Ekspor dan Persentase penurunan nilai impor

Tabel 2.1

Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan dan Pengembangan INDAG

Tahun 2016-2021

MISI	Meningkatkan Produktivitas, Daya Saing dan Kemandirian Industri berbasis unggulan daerah yang sistematis, berkelanjutan dan terintegrasi	Meningkatkan peran perdagangan sebagai sektor penggerak yang kuat dalam perekonomian daerah	Meningkatkan Layanan Prima kepada Masyarakat melalui Kinerja Organisasi yang efektif dan Aparatur profesional
TUJUAN	Peningkatan populasi dan persebaran industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kelancaran dan stabilitas sistem distribusi, pengamanan pasar dalam negeri dan perlindungan konsumen 2. Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor 	Peningkatan Kualitas Kelembagaan
SASARAN STRATEGIS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Pertumbuhan Populasi Industri dan Persebaran Industri 2. Meningkatnya Penguatan Struktur Industri dan Peningkatan Produktivitas Usaha Industri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Pertumbuhan Perdagangan Dalam Negeri 2. Meningkatnya Ekspor Daerah dan menurunnya impor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan melalui Sistem tatakelola keuangan yang transparan dan akuntabel 2. Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran yang sesuai SOP dan Berbasis Teknologi Informasi

Tabel 2.2 : Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Meningkatnya	1	Persentase Pertumbuhan	%	14.8

Pertumbuhan Populasi Industri dan Persebaran Industri		Industri Per tahun		
Meningkatnya Penguatan Struktur Industri dan Peningkatan Produktivitas Usaha Industri	2	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	6.20
	3	Nilai Investasi Sektor Industri	Milyar	169.3
	4	Persentase peningkatan tenaga kerja industri	%	12.00
	5	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri	%	8.00
	6	Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB	%	14.00
	7	Persentase Peningkatan nilai Ekspor	%	4.10
	8	Nilai Ekspor	Trilyun	1.350
	9	Persentase penurunan nilai impor	%	6.00
	Daerah dan menurunnya impor			

AKUNTABILITAS KINERJA

1.1 Capaian Kinerja Tahun 2017

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2017 diukur dengan cara membandingkan antara target pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2017 dengan realisasinya.

Tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2017 berdasarkan hasil pengukurannya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tingkat Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Bengkulu

Tahun 2017

MISI I : Meningkatkan Produktivitas, Daya Saing dan Kemandirian Industri berbasis unggulan daerah yang sistematis, berkelanjutan dan terintegrasi								
TUJUAN I : Peningkatan populasi dan persebaran industri								
SASARAN STRATEGIS I :								
Meningkatnya Pertumbuhan Populasi Industri dan Persebaran Industri								
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Capaian					% Capaian	Kategori
	2017	2013	2014	2015	2016	2017		
Persentase Pertumbuhan Industri Per tahun	14.8%	6.69%	6.67%	6.6%	14.27%	7.90%	53.38%	Cukup
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	6.2%	6.08%	6.29%	6.18%	6.21%	6.18%	99.68%	Baik
Rata – Rata Capaian							75.53	Baik
SASARAN STRATEGIS II :								
Meningkatnya Penguatan Struktur Industri dan Peningkatan Produktivitas Usaha Industri								
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Capaian					% Capaian	Kategori
	2017	2013	2014	2015	2016	2017		
Nilai Investasi Sektor Industri	169.3 Miliar	211 Miliar	396.7 Miliar	162,6 Miliar	169.3M ilyar	200.5 Miliar	118.43%	Sangat Baik
Persentase peningkatan tenaga kerja industri	12.00%	4.86%	5.82%	6.40%	8.87%	8.50%	70.83%	Cukup
Rata – Rata Capaian							94.63	Baik

MISI II : Meningkatkan peran perdagangan sebagai sektor penggerak yang kuat dalam perekonomian daerah								
TUJUAN II.1 : Meningkatnya kelancaran dan stabilitas sistem distribusi, pengamanan pasar dalam negeri dan perlindungan konsumen								
SASARAN STRATEGIS II.1 :								
Meningkatnya Pertumbuhan Perdagangan Dalam Negeri								
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Capaian					% Capaian	Kategori
	2017	2013	2014	2015	2016	2017		
Persentase Pertumbuhan	8.00%	8.05%	6.99%	7.03%	7.82%	8.69%	108.63%	Sangat Baik

Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri								
Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB	13.88%	13.24%	13.42%	13.35%	13.88%	14.40%	102.86%	Sangat Baik
Rata – Rata Capaian							105.75	Sangat Baik
TUJUAN II.2 : Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor								
SASARAN STRATEGIS II.2 :								
Meningkatnya Ekspor Daerah dan menurunnya impor								
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Capaian					% Capaian	Kategori
	2017	2013	2014	2015	2016	2017		
Persentase Peningkatan nilai Ekspor	4.09%	-1.98%	-1.21%	8.18	4.09%	77%	1878.05%	Sangat Baik
Nilai Ekspor	1.350 Trilyun	2.618 Trilyun	1.562 Trilyun	1.330 Trilyun	1.065 Trilyun	1.898.3 Trilyun	140.61%	Sangat Baik
Persentase penurunan nilai impor	6.00%	2.27%	5.25%	3.87%	3.47%	4.22%	142.18%	Sangat Baik
Rata – Rata Capaian							720.3%	Sangat Baik

MISI III : Meningkatkan Layanan Prima kepada Masyarakat melalui Kinerja Organisasi yang efektif dan Aparatur profesional								
TUJUAN III : Peningkatan Kualitas Kelembagaan								
SASARAN STRATEGIS III.1 :								
Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan melalui Sistem tatakelola keuangan yang transparan dan akuntabel								
Indikator Kinerja Penunjang	Target	Realisasi Capaian					% Capaian	Kategori
	2017	2013	2014	2015	2016	2017		
Nilai SAKIP	B	B	B	B	B	B	100	Sangat Baik
Nilai LPPD	B	B	B	B	B	B	100	Sangat Baik
Rata – Rata Capaian							100	Baik

TUJUAN 1
Peningkatan populasi dan persebaran industry

Mendapat predikat dengan capaian rata-rata pada kategori Baik dengan rata – rata persentase capaian 85.08 persen. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran 2 (dua) sasaran yang diukur melalui 4 (empat) indikator, menghasilkan 2 (dua) indikator dengan kategori sangat baik, 1 indikator dengan kategori baik dan 1 (satu)

<p>TUJUAN 2</p> <p>Meningkatnya kelancaran dan stabilitas sistem distribusi, pengamanan pasar dalam negeri dan perlindungan konsumen</p>	<p>indikator dengan kategori cukup.</p> <p>Mendapat predikat dengan capaian rata-rata pada kategori Sangat Baik dengan rata – rata persentase capaian 105.75 persen. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran 1 (satu) sasaran yang diukur melalui 2 (dua) indikator, dengan kategori sangat baik.</p>
<p>TUJUAN 3</p> <p>Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor</p>	<p>Mendapat predikat dengan capaian rata-rata pada kategori Sangat Baik dengan rata – rata persentase capaian 720.03 persen. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran 1 (satu) sasaran yang diukur melalui 3 (tiga) indikator, dengan kategori sangat baik.</p>
<p>TUJUAN 4</p> <p>Peningkatan Kualitas Kelembagaan</p>	<p>Mendapat predikat dengan capaian rata-rata pada kategori Sangat Baik dengan rata – rata persentase capaian 100 persen. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran 1 (satu) sasaran yang diukur melalui 2 (dua) indikator, dengan kategori sangat baik</p>

1.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2017

Sesuai Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021, terdapat 3 (tiga) misi dan 4 (empat) tujuan, serta 6 (enam) sasaran strategis, adapun analisa dari keempat sasaran strategis untuk mencapai empat tujuan dan empat misi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, akan diuraikan sebagai berikut :

1.2.1 Sasaran Strategis Kesatu

“Meningkatnya Pertumbuhan Populasi Industri dan Persebaran Industri”

Untuk dapat mencapai misi pertama, yaitu Meningkatkan Produktivitas, Daya Saing dan Kemandirian Industri berbasis unggulan daerah yang sistematis, berkelanjutan dan terintegrasi, serta dapat mencapai tujuan pertama, yaitu Peningkatan populasi dan persebaran industri, maka ditetapkan sasaran strategis yang pertama, yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Populasi Industri dan Persebaran Industri.

Dalam sasaran strategis yang pertama ini, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis pertama serta analisa dari ketiga Indikator Kinerja Utama nya, akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 :

SASARAN STRATEGIS 1 Tingkat Capaian Kinerja tahun 2013-2017

SASARAN STRATEGIS I :								
Meningkatnya Pertumbuhan Populasi Industri dan Persebaran Industri								
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Capaian					% Capaian	Kategori
	2017	2013	2014	2015	2016	2017		
Persentase Pertumbuhan Industri Per tahun	14.8%	6.69%	6.67%	6.6%	14.27%	7.90%	53.38%	Cukup
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	6.2%	6.08%	6.29%	6.18%	6.21%	6.18%	99.68%	Baik

Tabel 3.3 : Pencapaian Kinerja Sasaran I Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pertumbuhan Populasi Industri dan Persebaran Industri	Persentase Pertumbuhan Industri Per tahun	14.8%	7.90%	53.83%
		Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	6.20%	6.18%	99.68%

Tabel 3.4 : Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran I

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi 2016	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pertumbuhan Populasi Industri dan Persebaran Industri	Persentase Pertumbuhan Industri Per tahun	14.8%	14.27%	7.90%
		Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	6.20%	5.74%	6.18%

Tabel 3.5 : Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2017	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pertumbuhan Populasi Industri dan Persebaran Industri	Persentase Pertumbuhan Industri Per tahun	15.5%	7.90%	50.96%
		Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	7.00%	6.18%	88.28%

Tabel 3.6: Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2017	Realisasi Nasional	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pertumbuhan Populasi Industri dan Persebaran Industri	Persentase Pertumbuhan Industri Per tahun	7.90%	4.74%	Nilai PDRB sektor industri pengolahan Bengkulu Tahun 2017 mencapai 3.7 Trilyun, memberikan kontribusi sebesar 0.14 % terhadap PDB ADHB Nasional yang mencapai nilai sebesar Rp. 2.739 Trilyun pada Tahun 2017
		Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	6.18%	20.16%	Nilai PDB ADHB Nasional yang mencapai nilai sebesar Rp. 2.739 Trilyun pada Tahun 2017 dan memberikan kontribusi sebesar 20.16% terhadap total PDB ADHB Nasional Tahun 2017 yang mencapai Rp. 13.588 Trilyun

Tabel 3.7: Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Anggaran 2017	% Anggaran
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pertumbuhan Populasi Industri dan Persebaran Industri	Persentase Pertumbuhan Industri Per tahun	2.011.142.000,-	24.44%
		Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB		

Tabel 3.8 : Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3						
1	Meningkatnya Pertumbuhan Populasi Industri dan Persebaran Industri	Persentase Pertumbuhan Industri Per tahun	14.8%	7.90%	53.83%	2.011.142.000,-	1.624.225.380	80.76%
		Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	6.20%	6.18%	99.68%			

Tabel 3.9: Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya	Persentase	53.83%	80.76%	-26.93%

Pertumbuhan Populasi Industri dan Persebaran Industri	Pertumbuhan Industri Per tahun		
	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	99.68%	18.92%

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran satu adalah sebagai berikut:

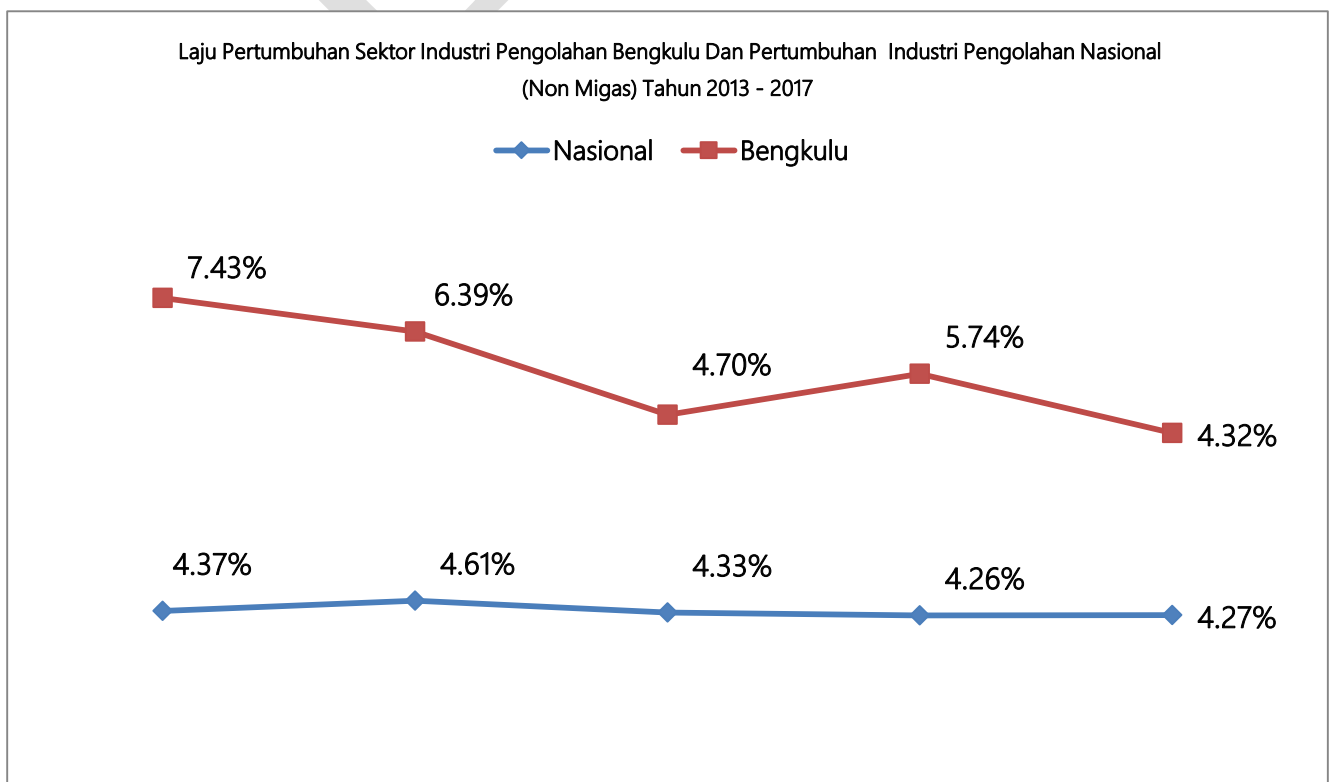
3.2.1.1 Indikator Kinerja Utama Pertama “Persentase Pertumbuhan Industri Per tahun”

Pertumbuhan sektor industri tahun 2017 tercatat sebesar 7.92 persen atau lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 14.8 persen, sebagaimana pada sasaran strategis satu, indikator kinerja satu, sehingga persentasenya hanya sebesar 53.83 persen.

Strategi dan Arah kebijakan pembangunan sektor industri dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu mencakup hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Penumbuhan Populasi Usaha Industri dengan hasil peningkatan jumlah populasi usaha industri dengan postur yang lebih sehat
2. Pengembangan perwilayahan industri dengan tujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan non-migas dan menumbuhkan populasi unit usaha industri besar dan sedang
3. Penguatan Struktur Industri dengan terintegrasinya IKM dalam gugus (cluster) industri, tumbuh dan berkembangnya gugus (cluster) industri demi penguatan daya saing di pasar global dan Peningkatan Produktivitas Usaha Industri
4. Peningkatan daya saing dan produktivitas dilakukan melalui pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri daerah.

Grafik 3.1 Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Bengkulu Dan Pertumbuhan Industri Pengolahan Nasional (Non Migas) Tahun 2013 – 2017



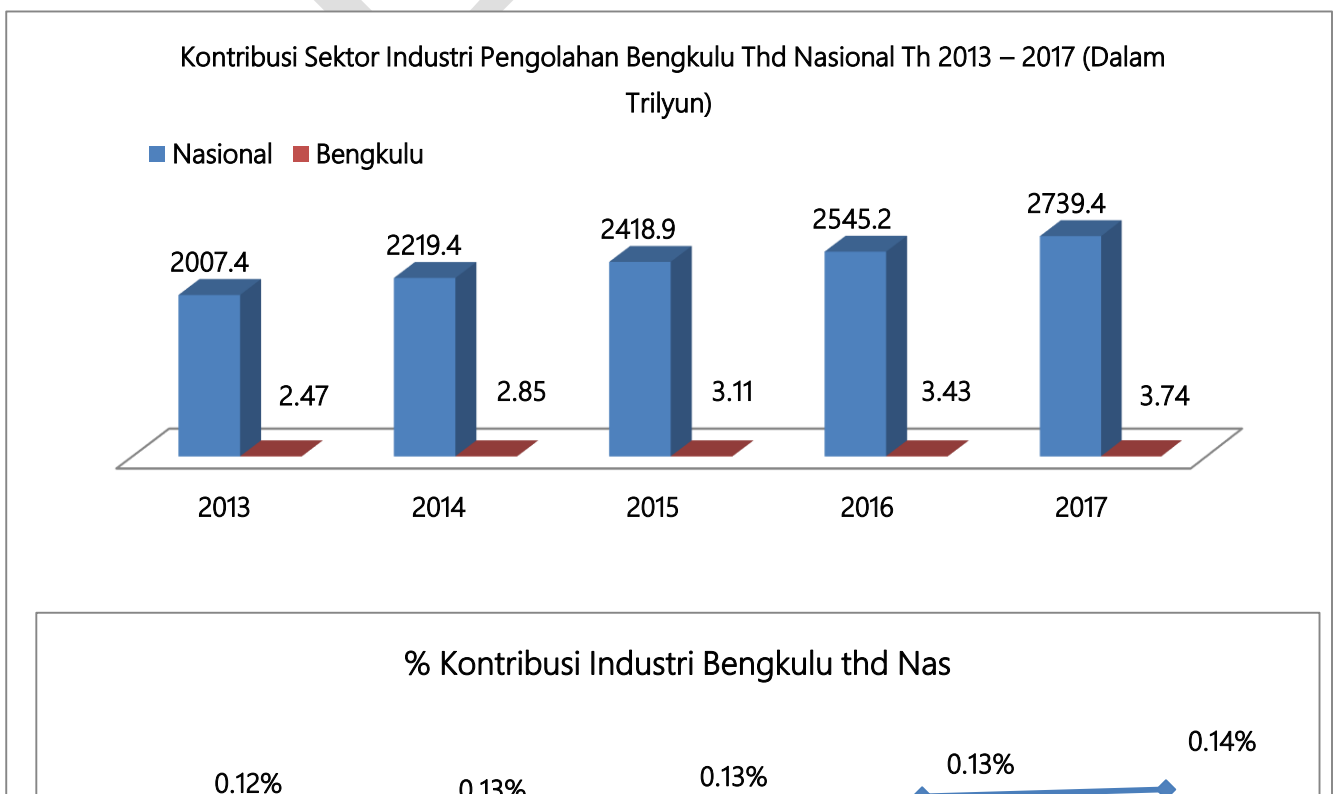
Jika dibandingkan dengan pertumbuhan Industri Nasional trend pertumbuhan sektor industri pengolahan Provinsi Bengkulu Tahun 2017 berada diatas pertumbuhan industri nasional, pertumbuhan sektor industri pengolahan Provinsi Bengkulu pada tahun 2017 mencapai 4,32 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan sektor industri pengolahan nasional, yaitu sebesar 4,27 persen, adapun perbandingannya dapat dilihat pada grafik 3.2 diatas.

3..2.1.2 Indikator Kinerja Utama Kedua “Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB”

Kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 3.7 trilyun atau sebesar 6.18 persen dari total PDRB – ADHB yang tercatat sebesar Rp. 60.67 trilyun atau lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 6.20 persen, sebagaimana pada sasaran strategis satu, indikator kinerja kedua, sehingga persentase capaiannya hanya sebesar 99.68 persen.

Meskipun pencapaian kinerja masih lebih rendah dari target yang ditetapkan, secara makro Kinerja Sektor Industri pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 303.72 Milyar atau meningkat 8.11 persen jika dibandingkan pada tahun 2016 yang mencapai nilai Rp 3.4 trilyun.

Grafik 3.2 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Bengkulu Thd Nasional Th 2013 – 2017 (Dalam Trilyun)



Berdasarkan data BPS atas tahun dasar 2010, secara kumulatif nilai PDRB ADHB sektor industri pengolahan Provinsi Bengkulu pada tahun 2017 mencapai Rp 3.7 trilyun memberikan kontribusi sebesar 0.14 persen terhadap PDB ADHB sektor industri pengolahan nasional yang mencapai nilai sebesar Rp 2.739 trilyun pada tahun 2017, adapun perbandingannya dapat dilihat pada grafik 3.1 Industri pengolahan Bengkulu Tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 4.32 persen bila dibandingkan Tahun 2016, melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 5.74 persen.

1.2.2 Sasaran Strategis Kedua

“Meningkatnya Penguatan Struktur Industri dan Peningkatan Produktivitas Usaha Industri”

Untuk dapat mencapai misi pertama, yaitu Meningkatkan Produktivitas, Daya Saing dan Kemandirian Industri berbasis unggulan daerah yang sistematis, berkelanjutan dan terintegrasi, serta dapat mencapai tujuan pertama, yaitu Peningkatan populasi dan persebaran industri, maka ditetapkan sasaran strategis yang kedua, yaitu Meningkatkan Penguatan Struktur Industri dan Peningkatan Produktivitas Usaha Industri.

Dalam sasaran strategis yang kedua ini, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis kedua serta analisa dari kedua Indikator Kinerja Utama nya, akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.10 :

SASARAN STRATEGIS 2 Tingkat Capaian Kinerja tahun 2013-2017

SASARAN STRATEGIS II :								
Meningkatnya Penguatan Struktur Industri dan Peningkatan Produktivitas Usaha Industri								
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Capaian					% Capaian	Kategori
	2017	2013	2014	2015	2016	2017		

							n	
Nilai Investasi Sektor Industri	169.3 Miliar	211 Miliar	396.7 Miliar	162,6 Miliar	169.3 Miliar	200.5 Miliar	118.43 %	Sangat Baik
Persentase peningkatan tenaga kerja industri	12.00 %	4.86%	5.82%	6.40 %	8.87 %	8.50 %	70.83%	Cukup

Tabel 3.11 : Pencapaian Kinerja Sasaran I Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya Penguatan Struktur Industri dan Peningkatan Produktivitas Usaha Industri	Nilai Investasi Sektor Industri	169.3 Miliar	200.5 Miliar	118.43%
		Persentase peningkatan tenaga kerja industri	12.00%	8.50%	70.83%

Tabel 3.12 : Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi 2016	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya Penguatan Struktur Industri dan Peningkatan Produktivitas Usaha Industri	Nilai Investasi Sektor Industri	169.3 Miliar	169.3Miliar	200.5 Miliar
		Persentase peningkatan tenaga kerja industri	12.00%	8.87%	8.50%

Tabel 3.13 : Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat
----	-------------------	-------------------	--------	-----------	---------

		Utama	Akhir RPJMD	2017	Kemajuan
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya Penguatan Struktur Industri dan Peningkatan Produktivitas Usaha Industri	Nilai Investasi Sektor Industri	206 Milyar	200.5 Milyar	118.43%
		Persentase peningkatan tenaga kerja industri	13%	8.50%	70.83%

Tabel 3.14 : Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2017	Realisasi Nasional	Keterangan
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya Penguatan Struktur Industri dan Peningkatan Produktivitas Usaha Industri	Nilai Investasi Sektor Industri	200.5 Milyar	275.38 Trilyun	Nilai Investasi sektor industry Bengkulu Tahun 2017 mencapai 200.5 Milyar, memberikan kontribusi sebesar 0.07% terhadap Nilai Investasi Industri Nasional yang mencapai nilai sebesar Rp. 275.38 Trilyun.
		Persentase peningkatan tenaga kerja industri	8.50%	9.38%	Penyerapan tenaga kerja sektor industry Bengkulu sebesar 17.794 Orang dengan persentase pertumbuhan sebesar 8.50% dan memberi kontribusi terhadap nasional sebesar 0.10% terhadap penyerapan tenaga kerja industry nasional sebanyak 17.4 Juta Orang.

Tabel 3.15: Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Anggaran 2017	% Anggaran
1	2	3	4	5
2	Meningkatnya Penguatan Struktur Industri dan Peningkatan Produktivitas Usaha Industri	Nilai Investasi Sektor Industri	2.011.142.000,-	24.44%
		Persentase peningkatan tenaga kerja industri		

Tabel 3.16 : Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3						
2	Meningkatnya Penguatan Struktur Industri dan Peningkatan Produktivitas Usaha Industri	Nilai Investasi Sektor Industri	169.3 Miliar	200.5 Miliar	97.33%	2.011.142.000,-	1.624.225.380,-	80.76 %
		Persentase peningkatan tenaga kerja industri	12.00 %	8.50%	65.38%			

Tabel 3.17 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya Penguatan Struktur Industri dan Peningkatan Produktivitas Usaha Industri	Nilai Investasi Sektor Industri	118.43%	80.76%	37.67%
		Persentase peningkatan tenaga kerja industri	70.83%		-9.93%

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran satu adalah sebagai berikut:

3.2.2.1 Indikator Kinerja Utama Pertama “Nilai Investasi Sektor Industri”

Nilai Investasi sektor industry berperan dalam menyumbang perekonomian daerah, tercatat nilai investasi sektor industry tahun 2017 sebesar 200.5 Miliar, meningkat sebesar 18.43 persen atau Rp 31.2 Miliar dibanding tahun 2016 yang hanya sebesar 169.3 Miliar. Adapun target indikator nilai investasi sektor industry tahun 2017 adalah sebesar 16.3 Miliar, sehingga capaian untuk indikator ini mencapai 118.43%.

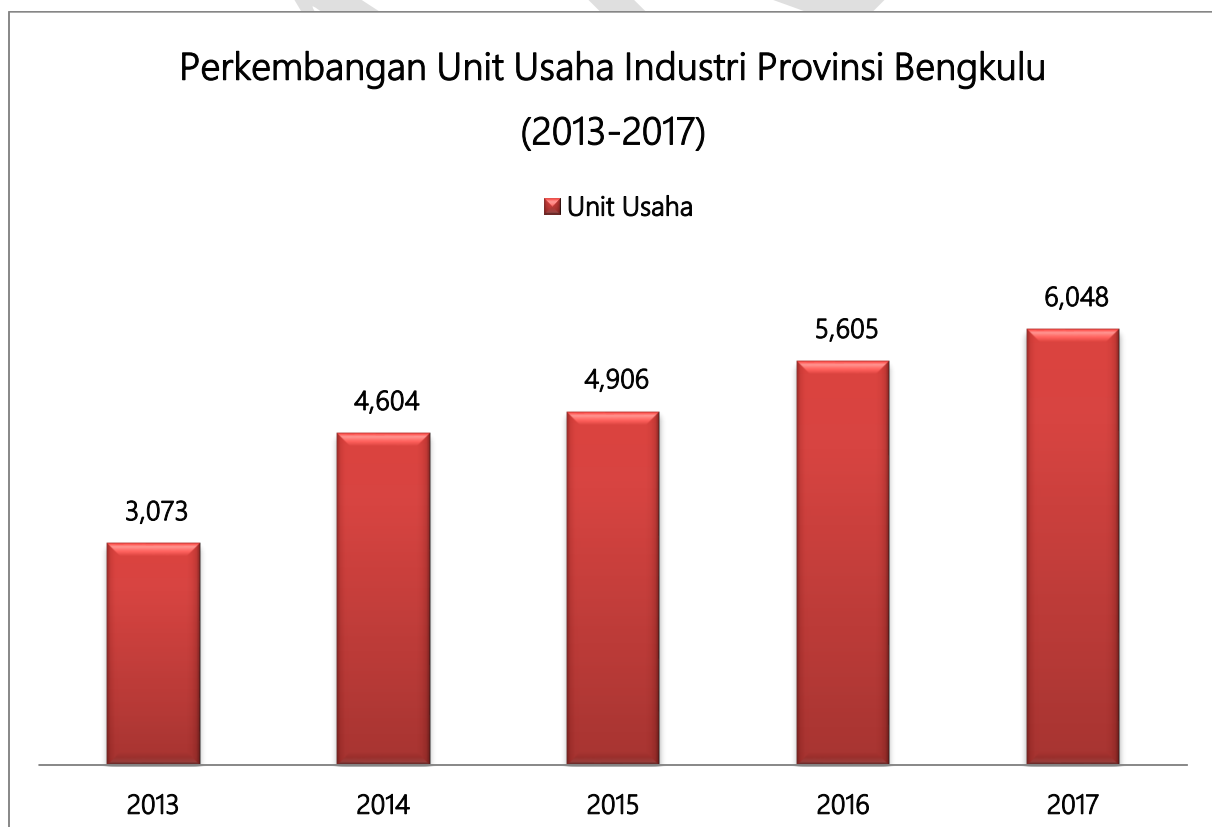
3.2.2.2 Indikator Kinerja Utama Pertama “Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Industri”

Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu selanjutnya adalah penyerapan tenaga kerja industri yang merupakan jumlah kumulatif tenaga kerja yang terserap di sektor industri pengolahan non migas sampai dengan tahun 2017. Sektor industri diharapkan menjadi leading sektor yang mampu mengungkit sektor lainnya serta membuka lapangan pekerjaan. Penyerapan tenaga kerja di sektor industri dihitung menggunakan data sakerna. Sampai dengan tahun 2014 tenaga kerja sektor industri pengolahan non migas mencapai 17.794 orang dengan persentasi peningkatan tenaga kerja industri sebesar 8.50% jika dibandingkan tahun 2016 yang hanya menyerap 16.320 Orang .

Terkait dengan capaian diatas, maka berikut diuraikan gambaran kondisi industri di Provinsi Bengkulu baik unit usaha, tenaga kerja, investasi dan nilai produksi, sebagai berikut:

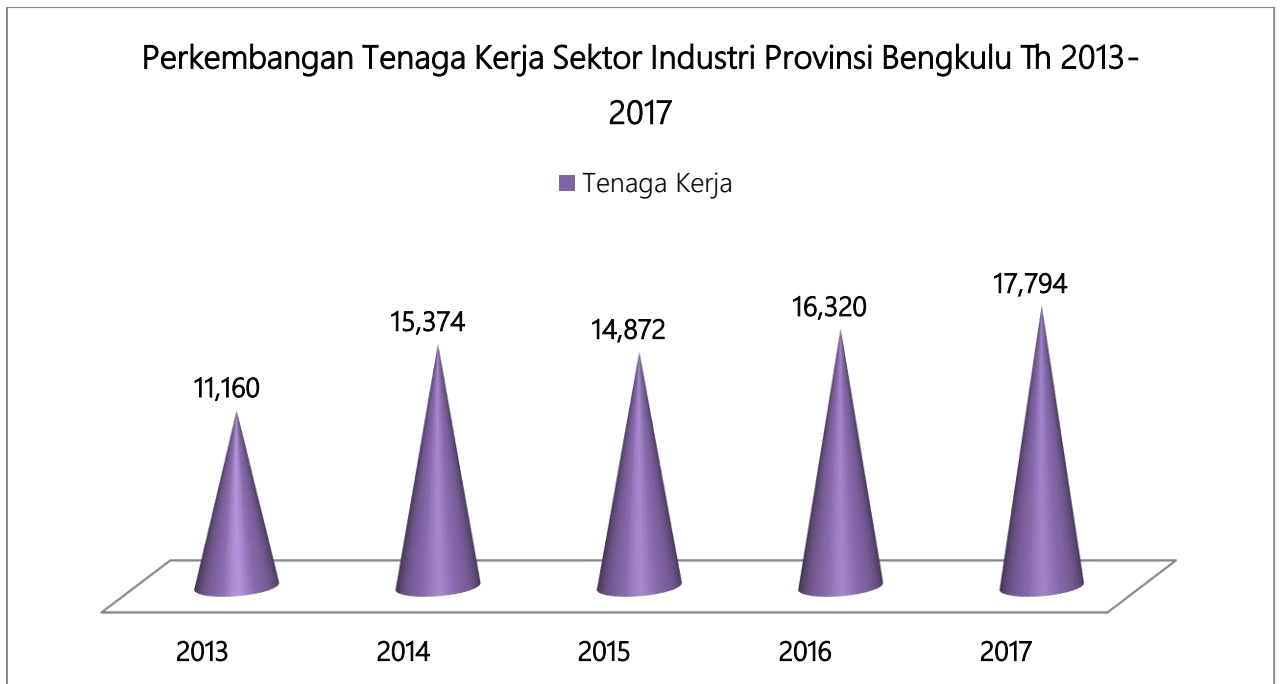
- a. Perkembangan Jumlah Unit Usaha Sektor Industri Provinsi Bengkulu Tahun 2013 – 2017

Grafik 3.3 Perkembangan Unit Usaha Industri di Provinsi Bengkulu 2013-2017



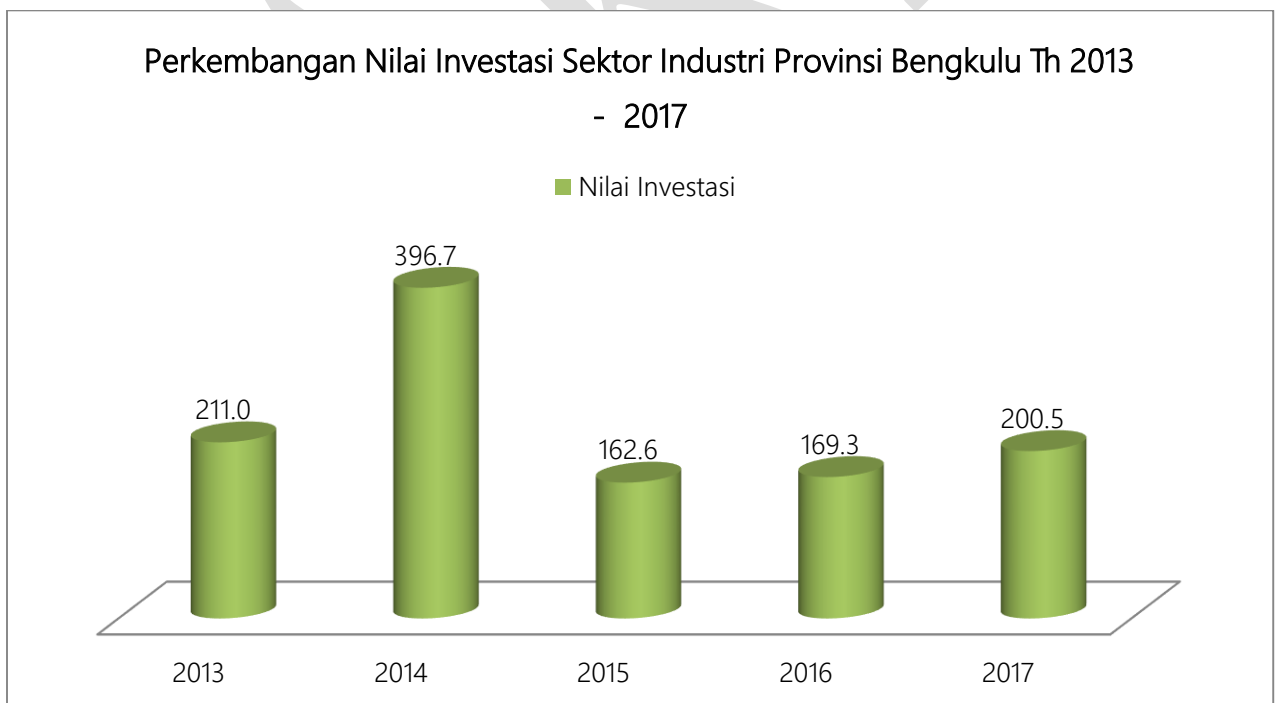
Perkembangan Jumlah Unit Usaha untuk skala IKM dari tahun 2016 sebanyak 5.605 Unit Usaha meningkat sebesar 7.32 persen atau 443 Unit Usaha menjadi 6.048 Unit Usaha di tahun 2017.

b. Perkembangan Tenaga Kerja Sektor Industri Provinsi Bengkulu Th 2013- 2017



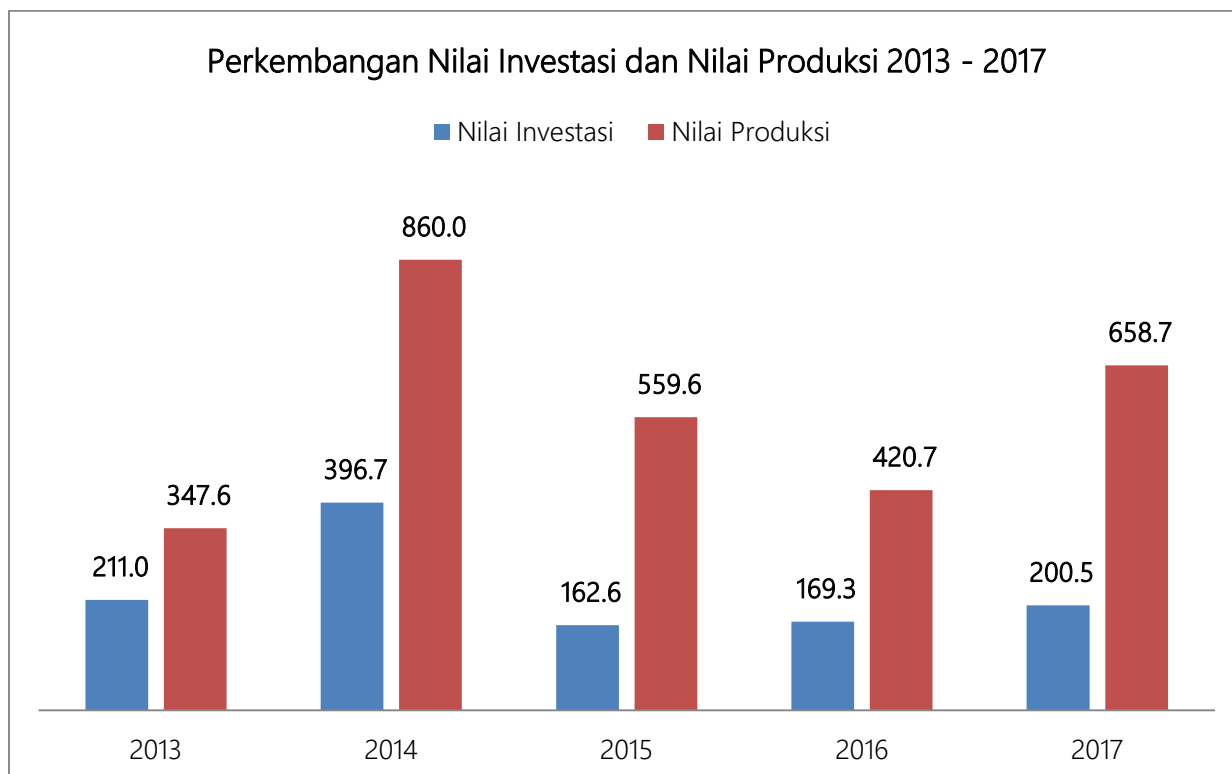
Untuk IKM perkembangan Tenaga Kerja dari tahun 2016 sebanyak 16.320 orang meningkat sebesar 8.5 persen atau 1.394 orang menjadi 17.794 orang di tahun 2017.

c. Perkembangan Nilai Investasi Sektor Industri Provinsi Bengkulu Th 2013 - 2017



Untuk IKM perkembangan nilai investasi dari tahun 2016 sebesar 169.3 Milyar meningkat sebesar 18.43 persen atau Rp 31.2 Milyar menjadi Rp 200.5 Milyar di tahun 2017.

d. Perkembangan Nilai Produksi Sektor Industri Provinsi Bengkulu Th 2013 - 2017



Untuk IKM perkembangan nilai Produksi dari tahun 2016 sebesar Rp 420.7 Milyar meningkat sebesar 36.13 persen atau Rp 376 Milyar menjadi Rp 238 Milyar di tahun 2016.

Untuk mendukung pencapaian 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran strategis pertama dan kedua, yaitu Persentase Pertumbuhan Industri Per tahun dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB, Nilai Investasi Sektor Industri dan Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Industri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu telah menyusun 3 (tiga) Program yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Unit Kerja, antara lain:

1. Bidang Industri Menengah dan Pengembangan Akses Industri
2. Bidang Industri Agro dan Pengembangan Perwilayahan Industri

Adapun rincian programnya adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Sentra - Sentra Industri Potensial

Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Program ini didukung oleh 5 (lima) kegiatan yaitu:

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Bagi IKM Unggulan di Sentra Industri
- b. Pembinaan dan Fasilitasi Industri Kecil Menengah (IKM) dalam pengembangan Dekranasda Provinsi Bengkulu
- c. Pembentukan Forum Koordinasi OVOP Provinsi
- d. Pemberdayaan IKM dan UKM Kampung Nelayan
- e. Pengembangan Diversifikasi Produk Unggulan

Pagu Anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp.9.908.745.350,- dan terealisasi sebesar Rp.9.516.375.682,- atau 96,04%.

Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan:

- a. Belum adanya kesadaran dari kabupaten/kota bahwa pendataan yang valid dan up to date sangat berperan dalam proses perencanaan pembangunan dibidang pengembangan IKM.
- b. Pengembangan industri melalui pendekatan Klaster, OVOP, Komoditi Potensial/ Kompetensi Inti Daerah dan Industri Kreatif belum sepenuhnya didukung oleh kabupaten/ kota.
- c. Masih rendahnya kreatifitas IKM dan kurangnya jiwa enterprenuer IKM, membuat sebagian besar IKM khususnya pengrajin hanya memproduksi barang jika ada pesanan saja.
- d. Lemahnya komunikasi dan koordinasi serta belum adanya sinkronisasi antara program/ kegiatan pembangunan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah antara Provinsi dan Kabupaten/ Kota sehingga pelatihan ataupun pembinaan yang dilaksanakan di wilayah kabupaten/ kota tidak dapat didukung oleh dana kabupaten/ kota.
- e. Adanya mutasi pejabat baik ditingkat pemerintah kabupaten/kota mengakibatkan tidak maksimalnya pelaksanaan program pengembangan IKM dikarena adanya masa transisi bagi pejabat baru untuk memahami pelaksanaan program tersebut.

Upaya Pemecahan Masalah:

- a. Proses pendataan tahun 2017 dilakukan melalui 3 cara yaitu melalui pendataan industri oleh kabupaten/ kota, kerjasama dengan Badan Pusat Statistik dan melalui pemanfaatan Tenaga Penyuluh Lapangan Kementerian Perindustrian serta Pendamping Industri Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu, Kerjasama dengan Badan Pusat Statistik dan Lembaga Penelitian Universitas di Darerah akan ditingkatkan agar potensi industri Provinsi Bengkulu dapat disusun secara optimal.
- b. Sinkronisasi dan sinergisitas program/kegiatan antara Provinsi dan Kabupaten/ Kota masih akan terus dilakukan dan diikuti dengan pelaksanaan kegiatan pelatihan, pembinaan dan sosialisasi pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/ Kota untuk memberikan motivasi pada pemerintah Kabupaten/ Kota dalam mendukung program pengembangan industri yang dilakukan oleh Pemerintah

- Provinsi. Ataupun sebaliknya Pemerintah Provinsi dapat mendukung kegiatan pengembangan industri yang diprioritaskan oleh kabupaten / kota.
- c. Komitmen dalam pengembangan industri melalui pendekatan kluster OVOP, komoditi potensial/ kompetensi inti daerah dan industri kreatif perlu diperkuat lagi baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota sehingga masing – masing pihak dapat menjalankan perannya dengan baik.
 - d. Membuka akses pasar yang lebih luas melalui pemanfaatan digital marketing, agar IKM dapat memproduksi produknya secara berkelanjutan.
 - e. Mendorong pengembangan industry kreatif daerah berbasis kearifan lokal guna mendorong kreatifitas IKM dan menambah nilai tambah produk daerah.

2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu:

- a. Bantuan Sarana dan Prasarana Bagi IKM (Kampung Nelayan)

Pagu Anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp. 25.620.000,- dan terealisasi sebesar Rp.25.620.000,- atau 100%.

Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan:

Kegiatan bantuan sarana dan prasarana tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana karena pada pelaksanaannya, para kelompok nelayan penerima bantuan peralatan tidak memiliki badan hukum. Kebijakan Pemerintah tentang Pemberian Hibah Barang/Uang dan Bantuan Sosial kepada Masyarakat , melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 298 Ayat (5) dan SE Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4627/SJ Tanggal 18 Agustus 2015, menjadi permasalahan karena KUB yang sudah terseleksi untuk mendapatkan bantuan hibah mesin dan peralatan industri belum siap secara legalitas.

Berdasarkan UNDANG-UNDANG No. 23 Tahun 2014 pasal 298 ayat 5 “*belanja hibah dapat diberikan ke Lembaga, badan, atau organisasi kemasyarakatan yang sudah berbadan hukum Indonesia atau terdaftar di Kemenkumham*” yang berarti mengharuskan pemerintah daerah hanya dapat memberikan dana hibah kepada lembaga, badan, atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum.

Upaya pemecahan masalah:

Melakukan sosialisasi tentang UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 298 Ayat (5) dan SE Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4627/SJ Tanggal 18 Agustus 2015 kepada para KUB

penerima bantuan hibah mesin dan peralatan industri serta memfasilitasi mereka untuk mendapatkan legalitas.

3. Program Pengembangan Industri Agro

Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Program ini didukung oleh 4 (empat) kegiatan yaitu:

- a. Penyusunan Direktori Perusahaan Binaan Industri Agro
- b. Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Industri Agro
- c. Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Perindag
- d. Penyusunan Perda Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bengkulu

Pagu Anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp. 526.940.000,- dan terealisasi sebesar Rp.319.937.853,- atau 60.72%.

Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan:

1. Terkait percepatan perintisan kawasan industri dan kawasan khusus, masih banyak Kab/Kota yang belum menyusun RPIK Kab/Kota sebagai pedoman dan acuan pengembangan kawasan industri, sentra industri dan kawasan khusus.
2. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran pelaku IKM makanan dan minuman dalam menggunakan bahan tambahan makanan. Selain itu IKM makanan dan minuman masih banyak yang belum menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik.
3. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan IKM pangan dalam melakukan diversifikasi dan inovasi dalam pengolahan komoditi hasil pertanian, perkebunan maupun kehutanan baik dalam rasa, jenis, bentuk maupun kemasan.
4. Masih banyaknya sumberdaya pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan belum diolah.

Upaya pemecahan masalah:

1. Kab/Kota melalui Disperindag dan Bappeda harus segera menyusun RPIK Kab/Kota agar pengembangan kawasan industri, kawasan khusus dan sentra industri di Provinsi Bengkulu dapat terwujud sesuai dengan target yang ditetapkan.
2. Perlu terus dilakukan peningkatan pemahaman tentang penggunaan Bahan Tambahan Pangan yang dilakukan pada setiap pelaksanaan Pelatihan pengolahan produk industri makanan dan minuman
3. Pelatihan pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan akan terus dilakukan, terutama di sentra sentra hasil pertanian

4. Dilakukannya pelatihan teknik produksi industri kepada masyarakat di daerah – daerah yang kaya dengan hasil pertanian, perikanan, perkebunan maupun kehutanan untuk menciptakan wira usaha baru dan meningkatkan nilai tambah produksi.
5. Perlunya kerjasama dengan instansi pendidikan yang membantu IKM dalam pengembangan industri.

1.2.3 Sasaran Strategis Ketiga

“Meningkatnya Pertumbuhan Perdagangan Dalam Negeri”

Untuk dapat mencapai misi kedua, yaitu Meningkatkan peran perdagangan sebagai sektor penggerak yang kuat dalam perekonomian daerah, serta dapat mencapai tujuan Kedua yang Pertama, yaitu Meningkatnya kelancaran dan stabilitas sistem distribusi, pengamanan pasar dalam negeri dan perlindungan konsumen, maka ditetapkan sasaran strategis yang ketiga, yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Perdagangan Dalam Negeri

Dalam sasaran strategis yang ketiga ini, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ketiga serta analisa dari kedua Indikator Kinerja Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.18 :

SASARAN STRATEGIS 3 Tingkat Capaian Kinerja tahun 2013-2017

SASARAN STRATEGIS III :								
Meningkatnya Pertumbuhan Perdagangan Dalam Negeri								
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Capaian					% Capaian	Kategori
	2017	2013	2014	2015	2016	2017		
Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri	8.00%	8.05%	6.99%	7.03%	7.82%	8.69%	108.63%	Sangat Baik

Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB	13.88%	13.24%	13.42%	13.35%	13.88%	14.40%	102.86%	Sangat Baik
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	-------------

Tabel 3.19 : Pencapaian Kinerja Sasaran III Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatnya Pertumbuhan Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri	8.00%	8.69%	108.63%
		Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB	13.88%	14.40%	102.86%

Tabel 3.20 : Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran III

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi 2016	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatnya Pertumbuhan Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri	8.00%	7.82%	8.69%
		Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB	13.88%	13.88%	14.40%

Tabel 3.13 : Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2017	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatnya	Persentase	10.00%	8.69%	86.9%

	Pertumbuhan Perdagangan Dalam Negeri	Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri			
		Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB	15.00%	14.40%	96%

Tabel 3.14 : Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2017	Realisasi Nasional	Keterangan
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatnya Pertumbuhan Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri	8.69%	4.44%	Nilai PDRB ADHB sektor perdagangan Bengkulu Tahun 2017 Rp. 8.6 Trilyun, memberikan kontribusi sebesar 0.5 persen terhadap PDB ADHB Nasional yang mencapai sebesar Rp. 1.767 Trilyun
		Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB	14.40%	13.01%	Nilai PDB ADHB sektor Perdagangan Nasional tahun 2017 mencapai Rp 1767 trilyun memberikan kontribusi sebesar 6.79 persen terhadap Total PDB ADHB nasional yang mencapai nilai sebesar Rp 13.588 trilyun pada tahun 2017

Tabel 3.15 : Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Anggaran 2017	% Anggaran
1	2	3	4	5

3	Meningkatnya Pertumbuhan Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri	922.930.000,-	11.22%
		Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB	2.968.721.000,-	36.07%

Tabel 3.16 : Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3						
3	Meningkatnya Pertumbuhan Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri	8.00%	8.69%	108.63 %	922.930.000,-	510.720.360,-	55.34%
		Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB	13.88 %	14.40 %	102.86 %	2.968.721.000,-	2.171.131.677,-	73.13%

Tabel 3.17: Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

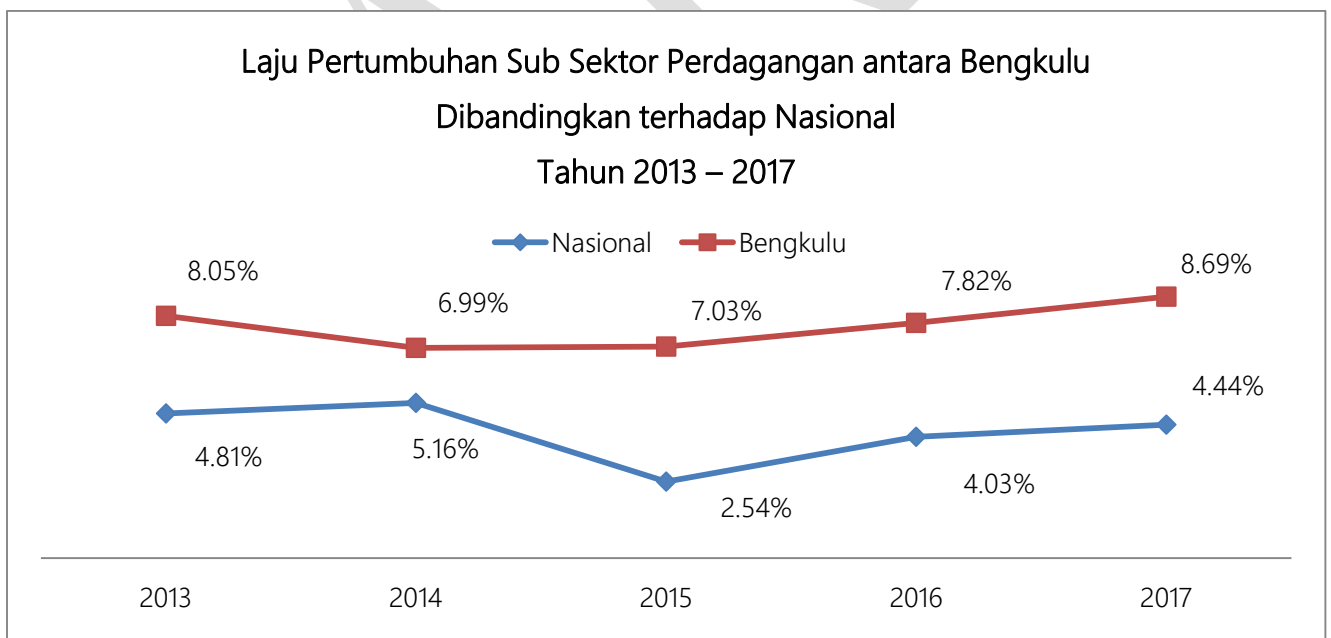
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatnya Pertumbuhan Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri	108.63%	55.34%	53.29%
		Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB	102.86%	73.13%	29.73%

1.2.3.1 Indikator Kinerja Utama Pertama "Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri"

Pertumbuhan sub sektor perdagangan tahun 2017 tercatat sebesar 8.69 persen atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 8.00 persen, sebagaimana pada sasaran strategis tiga, indikator kinerja satu yaitu persentase pertumbuhan sub sektor perdagangan, sehingga persentase capaiannya sebesar 108.63 persen.

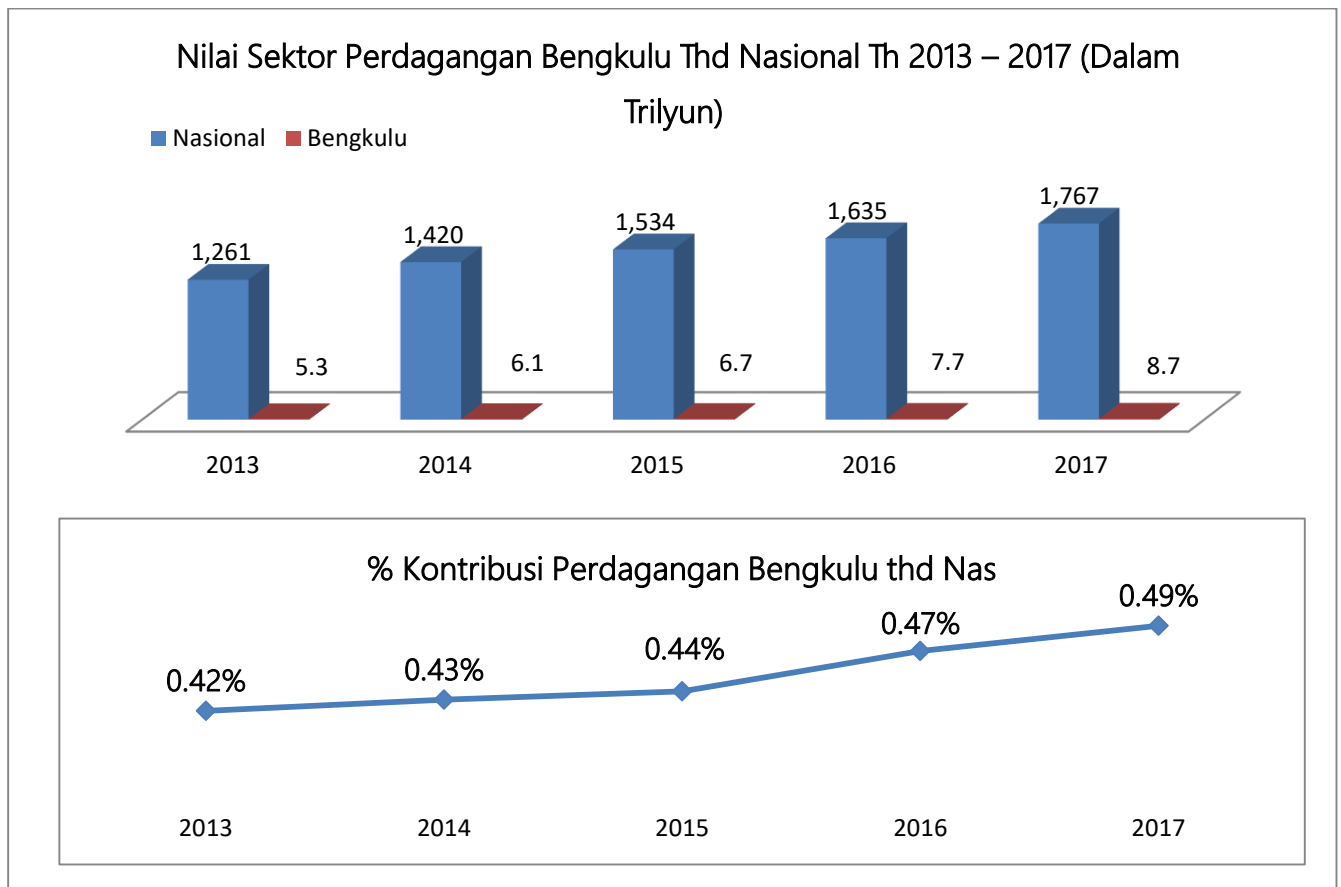
Pertumbuhan sub sektor perdagangan di Bengkulu selama tahun 2013-2017 Bengkulu mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat pada pertumbuhan sub sektor perdagangan di Bengkulu pada tahun 2013 sebesar 8.05 %, kemudian pada tahun 2014 pertumbuhan sub sektor perdagangan sebesar 6.99 %, berada pada titik terendah dan tahun 2014 pertumbuhan sebesar 7.03 %. Sedangkan tahun 2015 pertumbuhan sub sektor perdagangan sebesar 7.82 %. Pertumbuhan sub sektor perdagangan yang tumbuh melambat sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 dikarenakan adanya krisis global yang berdampak pada daya jual beli masyarakat. Di tahun 2017 kembali meningkat menjadi 8.69 % jauh melampaui pertumbuhan sub sektor perdagangan nasional yang mencapai 4.44 %. Trend pertumbuhan sub sektor perdagangan Bengkulu hampir selalui melampaui trend pertumbuhan sub sektor perdagangan Nasional seperti diilustrasikan dalam grafik 3.7.

Grafik 3.7 Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan antara Bengkulu dibandingkan terhadap nasional tahun 2013-2017



Nilai PDRB ADHB sektor perdagangan Bengkulu Tahun 2017 Rp. 8.6 Trilyun, memberikan kontribusi sebesar 0.5 persen terhadap PDB ADHB Nasional yang mencapai sebesar Rp. 1.767 Trilyun.

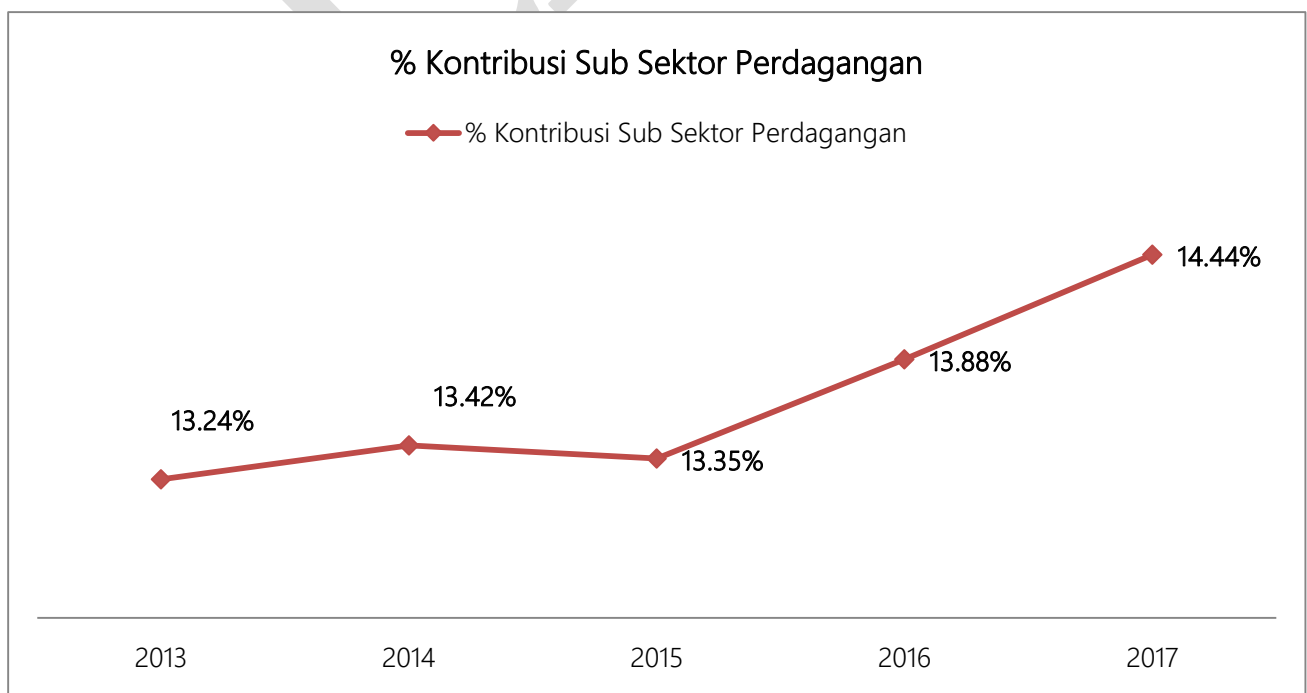
Grafik 3.8 Nilai Sektor Perdagangan Bengkulu Thd Nasional



1.2.3.2 Indikator Kinerja Utama Kedua “Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB”

Target kontribusi sub sektor perdagangan terhadap total PDRB ADHB Bengkulu Tahun 2017 ditetapkan sebesar 13.88 persen, realisasinya melampaui target, yaitu sebesar 14.40 persen. Dengan demikian capaian kinerja pada sasaran strategis keempat, indikator kinerja kedua ini adalah sebesar 102.86

Grafik 3.9 Persentase Kontribusi Sub Sektor Perdagangan Provinsi Bengkulu terhadap PRDB



Kontribusi Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB Bengkulu pada tahun 2013-2017 berkisar pada angka 13 - 14 persen. Nilai PDRB ADHB sektor perdagangan Bengkulu tahun 2017 mencapai Rp 8.7 trilyun memberikan kontribusi sebesar 14.44 persen terhadap Total PDRB ADHB Bengkulu yang mencapai nilai sebesar Rp 60.67 trilyun pada tahun 2017.

Untuk mendukung pencapaian 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran strategis ketiga yaitu Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri dan Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu telah menyusun 2 (dua) Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) Unit Kerja, yaitu Bidang Perdagangan Dalam Negeri.

Program-Program ini bertujuan meningkatkan efisiensi distribusi perdagangan, sarana dan prasarana penunjang perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing produk Bengkulu serta memberdayakan konsumen, penguatan lembaga perlindungan konsumen, dan optimalisasi pengawasan barang beredar terutama terhadap barang-barang strategis, obat dan makanan. Pelaksanaan program ini memiliki sasaran yang multilevel bukan saja kepada dunia usaha dan konsumen tetapi juga masyarakat, antara lain berupa:

1. Jaminan ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat melalui peningkatan pasar dan distribusi produk agro serta pembinaan pasar dan sosialisasi lelang agrobis.
2. Pengembangan pasar dalam negeri melalui promosi, pameran, himbauan penggunaan produk dalam negeri.
3. Pemberdayaan konsumen dan peningkatan kapasitas lembaga perlindungan konsumen, termasuk kapasitas lembaga penyelesaian sengketa konsumen.
4. Pemberdayaan pelaku usaha dagang mikro, kecil dan menengah melalui peningkatan sumber daya manusia, akses pasar, dan kemitraan usaha.
5. Memajukan perdagangan antar pulau memulai pembukaan Kantor Perwakilan Dagang di Provinsi lain.
6. Pemanfaatan secara optimal oleh para petani sistem resi gudang yang telah ada di wilayah kabupaten di Bengkulu.

Adapun rincian programnya adalah sebagai berikut:

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu:

1. Pengawasan Barang Berbahaya (B2)

2. Pengawasan Terpadu Penggunaan Bahan Berbahaya (B2)
3. Pendanaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Pagu Anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp. 271.930.000,- dan terealisasi sebesar Rp.109.826.500 atau 40.39%.

Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan:

1. Masyarakat belum menyadari akan hak-haknya sebagai konsumen sehingga belum ada suatu kemauan untuk memberi pelaporan bila terjadi kecurangan takaran dan dimana harus melaporkan.
2. Kurangnya partisipasi dari Dinas – Dinas terkait di Kabupaten/Kota dalam hal kegiatan pengawasan barang beredar dipasaran khususnya terhadap produk dari luar di karenakan keterbatasan dana, sarana dan SDM.
3. Penerapan standardisasi mutu produk masih terkendala dikarenakan keterbatasan informasi dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya standardisasi produk.
4. Masih banyaknya komoditi lokal maupun impor yang tidak sesuai dengan SNI. - Banyaknya barang tiruan/ palsu yang beredar di Pasar.

Upaya Pemecahan Masalah:

1. Sosialisasi terhadap standardisasi harus terus dilakukan sampai muncul kesadaran bagi pelaku usaha untuk memproduksi barang maupun jasa sesuai dengan standar kesehatan, keselamatan maupun standar ukuran dan masyarakat mendapatkan informasi tentang hak-haknya dalam mengkonsumsi barang maupun jasa.
2. Sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan penertiban alat takar dan ukur sehingga masyarakat memiliki pengetahuan tentang takar dan ukur serta dapat melaporkan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan jika terjadi kecurangan pengukuran.
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota perlu berpartisipasi dalam pelaksanaan pengawasan barang beredar melalui penyediaan dana pengawasan maupun peningkatan SDM pengawasan.
4. Sosialisasi Aku Cinta Indonesia (ACI), perlu terus dilakukan kepada para pelajar

Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu:

1. Penyusunan Profil Pasar
2. Pembuatan FS dan Master Plan Revitalisasi Pasar Tradisional
3. Fasilitasi Pasar Murah Provinsi Bengkulu

Pagu Anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp. 651.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.400.893.860 atau 61.58%.

Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

Permasalahan:

1. Meskipun koordinasi dalam rangka pengendalian telah dilakukan tetapi inflasi masih mengalami fluktuasi yang elastis dikarenakan adanya beberapa faktor penyumbang inflasi diluar kendali Disperindag Prov. Bengkulu seperti tarif dasar listrik, dan harga bahan bakar minyak.
2. Sistem Resi Gudang belum sepenuhnya dipahami dan dimanfaatkan oleh para petani Bengkulu, dan komoditi yang dapat disimpan juga masih terbatas.
3. Masih banyak dan sering terjadi disparitas harga antara kab / kota satu dengan yang lain.

Upaya Pemecahan Masalah:

1. Tim Pengendali Inflasi Bengkulu perlu melibatkan berbagai pihak yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap inflasi.
2. Agar resi gudang bermanfaat bagi petani, maka selain sosialisasi, perlu adanya subsidi untuk biaya transport dan biaya penyimpanan komoditi digudang serta pendampingan pengelolaan gudang yang kompeten dan professional
3. Diperlukan pelayanan informasi publik yang transparan kepada masyarakat sehingga dapat memperkecil disparitas harga.

1.2.4 Sasaran Strategis Keempat

“Meningkatnya Ekspor Daerah dan menurunnya impor”

Untuk dapat mencapai misi kedua, yaitu Meningkatkan peran perdagangan sebagai sektor penggerak yang kuat dalam perekonomian daerah, serta dapat mencapai tujuan Kedua, yaitu Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor, maka ditetapkan sasaran strategis yang keempat, yaitu Meningkatkan Ekspor Daerah dan menurunnya impor.

Dalam sasaran strategis yang ketiga ini, terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis keempat serta analisa dari ketiga Indikator Kinerja Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.18 :

SASARAN STRATEGIS 4 Tingkat Capaian Kinerja tahun 2013-2017

SASARAN STRATEGIS IV :

Meningkatnya Ekspor Daerah dan menurunnya impor								
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Capaian					% Capaian	Kategori
	2017	2013	2014	2015	2016	2017		
Persentase Peningkatan nilai Ekspor	4.09%	-1.98%	-1.21%	8.18	4.09%	77%	1878.05%	Sangat Baik
Nilai Ekspor	1.350 Trilyun	2.618 Trilyun	1.562 Trilyun	1.330 Trilyun	1.065 Trilyun	1.898.3 Trilyun	140.61%	Sangat Baik
Persentase penurunan nilai impor	6.00%	2.27%	5.25%	3.87%	3.47%	4.22%	142.18%	Sangat Baik

Tabel 3.19 : Pencapaian Kinerja Sasaran IV Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatnya Ekspor Daerah dan menurunnya impor	Persentase Peningkatan nilai Ekspor	4.09%	77%	1878.05%
		Nilai Ekspor	1.350 Trilyun	1.898.3 Trilyun	140.61%
		Persentase penurunan nilai impor	6.00%	4.22%	142.18%

Tabel 3.20 : Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran IV

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi 2016	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatnya Ekspor Daerah dan menurunnya impor	Persentase Peningkatan nilai Ekspor	4.09%	4.09%	77%
		Nilai Ekspor	1.350 Trilyun	1.065 Trilyun	1.898.3 Trilyun
		Persentase penurunan nilai impor	6.00%	3.47%	4.22%

Tabel 3.21 : Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2017	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatnya Ekspor Daerah dan menurunnya impor	Persentase Peningkatan nilai Ekspor	5.00%	77%	1.540%
		Nilai Ekspor	1,622 Trilyun	1,898.3 Trilyun	117%
		Persentase penurunan nilai impor	4.75%	4.22%	88.84%

Tabel 3.22 : Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2017	Realisasi Nasional	Keterangan
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatnya Ekspor Daerah dan menurunnya impor	Persentase Peningkatan nilai Ekspor	77%	9.09%	<p>Nilai Ekspor Non Migas Indonesia Tahun 2017 mencapai US\$ 168.73 Milyar, tumbuh sebesar 9.09 persen dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai US\$ 131.35 Milyar.</p> <p>Nilai Ekspor Non Migas Bengkulu Tahun 2017 mencapai US\$ 140.62 Juta, tumbuh signifikan sebesar 77 persen dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai US\$ 79.44 Juta.</p>
		Nilai Ekspor	1,8 Trilyun	2.273,05 Trilyun	<p>Nilai ekspor non migas Indonesia Tahun 2017 mencapai US\$ 168.73 Milyar, sedangkan Nilai Impor Non Migas Nasional mencapai US\$ 12.51 Milyar, sehingga Nilai Net Ekspor Non Migas Nasional Tahun 2017 Surplus US\$ 156.22 Milyar.</p> <p>Nilai Ekspor Non Migas Bengkulu Tahun 2017 mencapai US\$ 140.62 Juta, sedangkan Nilai Impor Non Migas Bengkulu mencapai US\$ 11.94 Juta, sehingga Nilai Net Ekspor Non Migas Bengkulu Tahun 2017 Surplus US\$ 128.68 Juta.</p>
		Persentase penurunan nilai impor	4.22%	19.77%	<p>Nilai Impor Bengkulu yang mencapai US\$ 11.94 Juta dan hanya tumbuh sebesar 4.22%.</p>

Tabel 3.23 : Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Anggaran 2017	% Anggaran
1	2	3	4	5
4	Meningkatnya Ekspor Daerah dan menurunnya impor	Persentase Peningkatan nilai Ekspor Nilai Ekspor Persentase penurunan nilai impor	2.045.791.000,-	24.86%

Tabel 3.24: Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3						
4	Meningkatny	Persentase	4.09%	4.09%	1878.05%	2.045.791.000,-	1.660.411.047,-	81.16%

	a Ekspor Daerah dan menurunnya impor	Peningkatan nilai Ekspor						
		Nilai Ekspor	1.350 Trilyun	1.065 Trilyun	140.61%			
		Persentase penurunan nilai impor	6.00%	3.47%	142.18%			

Tabel 3.25 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatnya Ekspor Daerah dan menurunnya impor	Persentase Peningkatan nilai Ekspor	1878.05%	81.16%	1.796%
		Nilai Ekspor	140.61%		59.45%
		Persentase penurunan nilai impor	142.18%		61.02%

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran satu adalah sebagai berikut:

1.2.4.1 Indikator Kinerja Utama Kedua “Persentase Peningkatan Nilai Ekspor”

Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Bengkulu meningkat signifikan sebesar 77% jika dibandingkan Tahun 2016 yang hanya tumbuh 4.09%. Jika dilihat berdasarkan target yang ditetapkan sebesar 4.09%, pencapaian tahun 2017 jauh melampaui target sebesar 1.878,05%. Tingginya pencapaian target dikarenakan adanya penambahan komoditas ekspor yaitu kopi dan kayu dammar batu yang sebelumnya tidak masuk dalam komoditas ekspor di tahun 2016.

Perdagangan luar negeri yang merupakan bisnis antar negara dipengaruhi oleh faktor internal (situasi dan kondisi dalam negeri) serta faktor eksternal (kondisi global). Beberapa faktor internal yang berpengaruh terhadap kinerja ekspor diantaranya menyangkut produk/ komoditi (standard kualitas, kuantitas dan kontinuitas pasokan, keamanan dan keselamatan), transportasi, logistik, regulasi, serta ketangguhan dan keuletan pelaku usaha/ eksportir. Sementara faktor eksternal yang mempengaruhi antara lain hasil perundingan kerjasama perdagangan luar negeri dalam bentuk Free Trade Agreement (FTA), isu-isu internasional terkait K3 (Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan), serta kondisi ekonomi global.

Belum tingginya penetapan target presentase pertumbuhan ekspor Bengkulu tahun 2017 sebesar 4.09% tidak terlepas dari pengaruh kedua faktor di atas. Beberapa regulasi yang terkait dengan ketentuan ekspor beberapa produk yang dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah, seperti untuk ekspor produk industri kehutanan dan pertambangan implementasinya masih memberatkan eksportir tingkat UKM.

Disisi lain, belum pulihnya krisis ekonomi yang melanda negara-negara besar yang selama ini menjadi tujuan ekspor yang potensial menjadi salah satu penyebab tertekannya ekspor. Selain itu menurunnya daya beli sebagai akibat melemahnya nilai rupiah terhadap US\$ mengakibatkan dunia usaha mengurangi impor bahan baku/ bahan penolong maupun mesin/ peralatan. Berkurangnya pasokan bahan baku/ penolong tersebut menyebabkan kapasitas produksi berkurang, sehingga mengakibatkan ekspor juga berkurang.

Sebagaimana tersebut diatas, bahwa kegiatan eksportasi merupakan proses yang melibatkan mata rantai kegiatan yang cukup panjang, mulai dari bahan baku, proses produksi, promosi, pemasaran, distribusi, fiskal, perbankan, regulasi serta saranaprasarana pendukung lainnya. Oleh karena itu strategi yang diterapkan diharapkan mampu mengatasi hambatan-hambatan pada tiap-tiap mata rantai kegiatan ekspor, antara lain :

Aspek Kelembagaan:

1. Target melipat-tigakan ekspor dalam lima tahun ditetapkan sebagai Target Ekspor Nasional.
2. Perlunya payung hukum melalui Keputusan Presiden (Keppres), termasuk di dalamnya pembentukan Tim Pencapaian Target Ekspor Nasional (TIPTEN), agar menjadi komitmen nasional dan mampu menggerakkan seluruh sumber daya yang ada.

Aspek Pasar:

1. Strategi pasar secara detail dirancang sesuai produk berdasarkan permintaan produk tersebut yang tinggi dan kemampuan ekspor Indonesia ke pasar tersebut masih relatif rendah sehingga potensial untuk dikembangkan serta mempertimbangkan sisi supply (komposisi bahan baku dan porsi output yang diekspor).
2. Dari sisi pemasaran, diperlukan optimalisasi market intelligence
3. Perwakilan perdagangan (Atase Perdagangan) dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di semua negara perlu dioptimalkan untuk identifikasi peluang pasar, informasi kebutuhan produk, hambatan perdagangan, jaringan distribusi dan logistik, serta menjalin hubungan dengan buyer dalam rangka mempertahankan penguasaan pasar ekspor
4. Membentuk Promosi Terintegrasi (nasional dan internasional) untuk menyatukan visi-misi promosi yang selama ini terpecah di berbagai lembaga.
5. Menggencarkan promosi di dalam negeri baik skala internasional, nasional, maupun daerah.
6. Meningkatkan pengamanan perdagangan produk Indonesia di pasar internasional (tuduhan dumping, safeguards, dan subsidi oleh negara tujuan ekspor)

Aspek Regulasi/Kebijakan dan lain-lain:

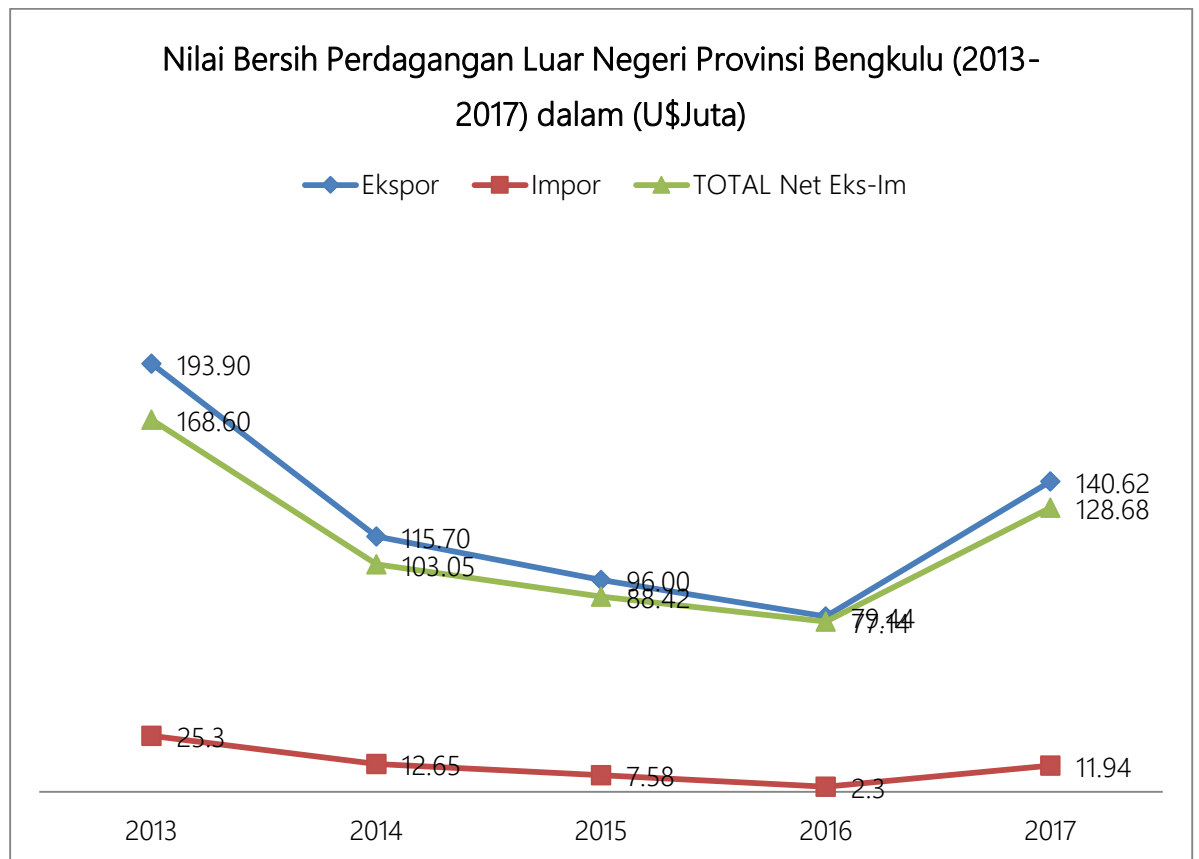
1. Melakukan sinkronisasi peraturan ekspor serta sosialisasi kepada stake holder dan dunia usaha yang bergerak di bidang ekspor.
2. Penerapan strategi hilirisasi, yaitu melakukan ekspor dalam bentuk produk-produk hilir untuk meningkatkan nilai tambah.
3. Melibatkan Perguruan Tinggi untuk mengkaji produk dan pasar potensial Bengkulu
4. Penyusunan / pemetaan pengusaha potensial UKM yang berorientasi.
5. Pembuatan dashboard dengan memuat berbagai data/informasi ekspor impor yang dapat bermanfaat sebagai Early Warning System (EWS).
6. Peningkatan kerjasama antar daerah/ provinsi.
7. Kemudahan pelayanan perijinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSP).
8. Koordinasi dengan stake holder dan dunia usaha untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi eksportir
9. Penyelenggaraan berbagai pelatihan ekspor.
10. Peran market intelligence Perwakilan RI di luar negeri, termasuk Perwakilan Perdagangan (Atdag) dan ITPC dalam identifikasi peluang pasar, informasi kebutuhan produk, hambatan perdagangan, jaringan distribusi dan logistik dilaksanakan dengan baik.

Ekspor Bengkulu tahun 2017 nilainya mencapai Rp. 1.8 Trilyun dan hanya memberikan kontribusi sebesar 0.08 % terhadap ekspor nasional tahun 2017 yang mencapai nilai Rp. 2.273,05 Trilyun. Sedangkan nilai impor Bengkulu tahun 2017 mencapai nilai Rp. 161 Milyar dan hanya memberikan kontribusi sebesar 0.10 % terhadap impor nasional tahun 2017 yang mencapai nilai Rp. 168 Trilyun

1.2.4.2 Indikator Kinerja Utama Kedua "Nilai Ekspor"

Target Indikator Kinerja Nilai Ekspor Perdagangan Luar Negeri tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp. 1,898 Trilyun, realisasi kinerja pada tahun 2017 dapat melampaui target yang ditetapkan yaitu surplus sebesar Rp. 548.3 Milyar, sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 1.878.05 persen. Peningkatan nilai ekspor yang tinggi disebabkan penambahan komoditi ekspor yaitu kopi dan kayu dammar batu.

Grafik. 3.10 Nilai Bersih Perdagangan Luar Negeri Provinsi Bengkulu (2013-2017)



Sumber Data : Pemberitahuan Ekspor Barang Bengkulu (PEB)

Surat Keterangan Asal (SKA)

BPS Provinsi Bengkulu, 2013 - 2017

Nilai bersih perdagangan luar negeri Bengkulu Tahun 2017 sebesar US\$ 128.68 Juta, dengan komoditi penyumbang ekspor daerah terbanyak adalah cangkang sawit dan batu bara. Selain itu, untuk tahun 2017, terdapat penambahan komoditi ekspor melalui damar batu dan kayu karet yang ikut menyumbang peningkatan nilai ekspor daerah tahun 2017

Tabel 3.25 : Kontribusi Ekspor Impor Non Migas Bengkulu Terhadap Ekspor Impor Non Migas Nasional (Th. 2013 - 2017)

TAHUN	EKSPOR BENGKULU (US\$ Juta)	EKSPOR NASIONAL (US\$ Juta)	KONTRIBUSI BENGKULU (%)	IMPOR BENGKULU (US\$ Juta)	IMPOR NASIONAL (US\$ Juta)	KONTRIBUSI BENGKULU (%)
2013	\$ 193.90	149,918.80	0.129%	25.3	141,362.30	0.018%
2014	\$ 115.70	\$ 145,960.08	0.079%	\$ 12.65	134,718.90	0.009%
2015	\$ 96.00	\$ 131,700.06	0.073%	\$ 7.58	118,126.40	0.006%
2016	\$ 79.44	\$ 145,186.20	0.055%	\$ 2.30	116,925.40	0.002%
2017	\$ 140.62	\$ 168,728.60	0.083%	\$ 11.94	132,585.40	0.009%

Dari Tabel 3.25 dapat dilihat, ekspor Non Migas Bengkulu tahun 2017 nilainya mencapai US \$ 140.62 Juta memberikan kontribusi sebesar 0.083 % terhadap ekspor nasional tahun 2017 yang mencapai nilai US\$ 168.72 milyar. Sedangkan

nilai impor Bengkulu tahun 2017 mencapai nilai US\$ 11.94 Juta memberikan kontribusi sebesar 0.009 % terhadap impor nasional tahun 2017 yang mencapai nilai US \$ 132.5 milyar.

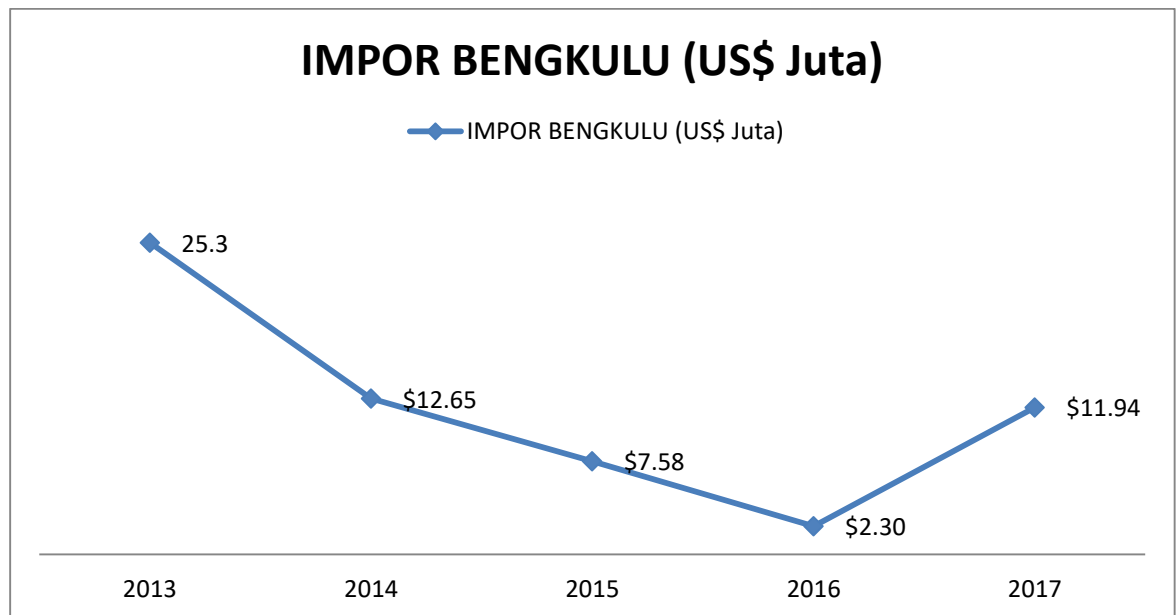
Berdasarkan data tabel tersebut diatas, bahwa kinerja ekspor impor Provinsi Bengkulu masih sangat kecil kontribusinya terhadap Ekspor Impor Nasional. Perlu berbagai upaya yang harus dilakukan kedepan guna mendorong kinerja ekspor daerah antara lain sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan kualitas produk daerah dan ekspor yang bernilai tambah lebih tinggi serta peningkatan kemudahan ekspor dan fasilitasi perdagangan yang lebih baik.
2. Meningkatkan pemanfaatan skema kerja sama perdagangan internasional dan mendorong para pengusaha untuk ekspor, serta mencetak para eksportir baru.
3. Meningkatkan partisipasi pengusaha daerah (terutama IKM) dalam jaringan produksi global. Dalam jangka menengah, diharapkan terjadi pergeseran struktur ekspor daerah dimana tidak lagi nanti bergantung kepada ekspor komoditas barang mentah seperti batubara dan cangkang sawit, tapi bergantung pada ekspor yang sudah diolah.

1.2.4.3 Indikator Kinerja Utama Ketiga "Persentase Penurunan Nilai Impor"

Target Indikator Kinerja Persentase penurunan nilai impor tahun 2017 ditetapkan sebesar 6.00%, realisasi kinerja pada tahun 2017 dapat melampau target yang ditetapkan yaitu surplus 142.18%. Berhasilnya penurunan nilai impor, dikarenakan impor yang ada di Provinsi Bengkulu hanya sebatas bahan baku penolong industry bukan barang konsumsi.

Grafik. 3.11 Nilai Impor Provinsi Bengkulu (2013-2017)



Dalam rangka pengendalian impor, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah adalah :

1. Meningkatkan pengawasan dalam rangka perlindungan konsumen, yaitu pengawasan terhadap aspek kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen serta pengawasan terhadap perlindungan HKI, perlindungan kepentingan pembangunan ekonomi Nasional, pengawasan atas kewajiban SNI & label-manual-garansi.
2. Mendorong fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE). Hal tersebut untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di luar negeri melalui kemudahan impor bahan baku
3. Mendorong investasi pembangunan industry intermediate yang memproduksi bahan baku industry guna menekan impor bahan baku
4. Adanya deregulasi kebijakan perdagangan yang menggerakkan kembali sector riil dan meningkatkan daya saing industry nasional untuk menghadapi dinamika
5. Melakukan koordinasi dengan provinsi lain dalam rangka pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dari daerah lain di luar Bengkulu sebagai alternatif pengganti barang-barang impor (substitusi impor).
6. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan KADINDA Bengkulu untuk menawarkan kepada investor/perusahaan asing untuk berinvestasi yang diarahkan pada pendirian industri yang menghasilkan produk setengah jadi yang dipakai sebagai bahan baku industri dalam negeri yang nantinya akan diekspor, seperti Pengalengan Ikan, tepung Mokaf, Minyak Goreng, Briket Batu Bara dan lain – lain.

7. Pembangunan industri-industri pendukung yang mengolah bahan baku dalam kuantitas, kualitas dan harga yang bersaing.
8. Ketersediaan informasi dan kebijakan impor yang kondusif dalam rangka pengendalian impor di Bengkulu.

Untuk mendukung pencapaian 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran strategis keempat, yaitu Persentase Peningkatan Nilai Ekspor, Nilai Ekspor dan Penurunan Nilai Impor, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu telah menyusun 2 (dua) program yang dilaksanakan oleh Bidang Perdagangan Luar Negeri dan BPPMB, adapun rincian programnya adalah sebagai berikut

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas Lab Penguji Mutu Barang Ekspor dan Impor
2. Pendataan dan Monitoring Produk Unggulan Provinsi Bengkulu

Pagu Anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp. 703.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.652.150.027 atau 92.77%.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Program ini didukung oleh 4 (empat) kegiatan yaitu:

1. *Promosi dan Fasilitasi Produk Unggulan Daerah Provinsi Bengkulu*
2. *Pengadaan Kemasan Susu*
3. *Konfrensi Kopi Daerah*
4. *Lomba Inovasi Khas Daerah*

Pagu Anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.342.791.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.008261.020 atau 75.09%.

Permasalahan dan Upaya pemecahan Permasalahan:

Permasalahan:

1. Masih belum optimalnya ketersediaan data dan informasi terkait dengan kegiatan ekspor – impor secara terintegrasi untuk memudahkan pengendalian dan pengambilan keputusan oleh stake holder.
2. Impor masih didominasi oleh impor bahan baku, dimana hal ini disebabkan oleh kualitas yang dibutuhkan oleh industri belum tersedia di dalam negeri, walaupun tersedia pada umumnya harga tidak bersaing dan secara kuantitas belum bisa berkesinambungan.

3. Kebutuhan akan hasil-hasil pertanian belum sepenuhnya tercukupi oleh produksi dalam negeri, seperti kedelai, bawang putih dan lainnya.
4. Kurangnya daya saing produk dalam negeri menyebabkan semakin meningkatnya permintaan barang luar negeri yang mempunyai kualitas lebih baik, mengingat semakin membaiknya ekonomi masyarakat Bengkulu.
5. Sumber Daya Manusia (SDM) industri dalam negeri belum optimal dalam penguasaan teknologi dan kemampuan melakukan inovasi di tingkat perusahaan sehingga menghasilkan produk yang berdaya saing.
6. Lebih mahalnya biaya angkut antar pulau dibandingkan dengan biaya angkut luar negeri ikut mempengaruhi harga produksi dalam negeri sehingga masyarakat cenderung mengkonsumsi produk-produk luar negeri.

Upaya Pemecahan Masalah:

1. Penyempurnaan aplikasi pengendalian impor-ekspor agar mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh stake holder.
2. Perlu adanya dorongan investasi untuk membangun industry intermetiade di Indonesia yang memproduksi bahan baku industry untuk menekan impor bahan baku industry serta adanya pemberian insentif terhadap ongkos angkut antar pulau yang dapat menekan cost produksi.
3. Melakukan koordinasi antar provinsi dalam rangka mensubstitusi bahan baku impor dengan komoditi agro yang tersedia di nusantara.
4. Memperlancar distribusi dan perdagangan barang antar daerah dengan efisiensi rantai pasokan. - Mendorong daya saing industry nasional melalui deregulasi, debirokratisasi serta penegakkan hukum dan kepastian usaha.

1.2.5 Sasaran Strategis Kelima

“Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan melalui Sistem tatakelola keuangan yang transparan dan akuntabel”

Untuk dapat mencapai misi ketiga yaitu Meningkatkan Layanan Prima kepada Masyarakat melalui Kinerja Organisasi yang efektif dan Aparatur profesional, serta dapat mencapai tujuan ketiga, yaitu Peningkatan Kualitas Kelembagaan, maka ditetapkan sasaran strategis yang kelima, yaitu Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan melalui Sistem tatakelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Dalam sasaran strategis yang ketiga ini, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis keempat serta analisa dari ketiga Indikator Kinerja Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.26:

SASARAN STRATEGIS 5 Tingkat Capaian Kinerja tahun 2013-2017

SASARAN STRATEGIS V :								
Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan melalui Sistem tatakelola keuangan yang transparan dan akuntabel.								
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Capaian					% Capaian	Kategori
	2017	2013	2014	2015	2016	(Asumsi) 2017		
Nilai Sakip	B	B	B	B	B	B	100	Baik
Nilai LPPD	B	B	B	B	B	B	100	Baik

Tabel 3.27 : Pencapaian Kinerja Sasaran V Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2017	Realisasi 2017 (Asumsi)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
5	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan melalui Sistem tatakelola keuangan yang transparan dan akuntabel	Nilai Sakip	B	B	100
		Nilai LPPD	B	B	100

Tabel 3.28 : Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran V

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi 2016	Realisasi 2017 (Asumsi)
1	2	3	4	5	6
5	Meningkatnya transparansi,	Nilai Sakip	B	B	B

	akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan melalui Sistem tatakelola keuangan yang transparan dan akuntabel menurunnya impor	Nilai LPPD	B	B	B
--	--	------------	---	---	---

Tabel 3.29 : Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2017 (Asumsi)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
5	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan melalui Sistem tatakelola keuangan yang transparan dan akuntabel	Nilai Sakip	A	B	80%
		Nilai LPPD	A	B	80%

Tabel 3.30 : Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2017 (Asumsi)	Realisasi Nasional	Keterangan
1	2	3	4	5	6
5	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan melalui Sistem tatakelola keuangan yang transparan dan akuntabel	Nilai Sakip	B	B	100
		Nilai LPPD	B	B	100

Tabel 3.31 : Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Anggaran 2017	% Anggaran
1	2	3	4	5
5	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan melalui Sistem tatakelola keuangan yang transparan dan akuntabel	Nilai Sakip	3.249.354.000	39.48%
		Nilai LPPD		

Tabel 3.32 : Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi 2017 (Asumsi)	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3						
5	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan melalui Sistem tatakelola keuangan yang transparan dan akuntabel	Nilai Sakip	B	B	100	3.249.354.000	2.876.687.686	88.53%
		Nilai LPPD	B	B	100			

Tabel 3.33: Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
5	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan melalui Sistem tatakelola keuangan yang transparan dan akuntabel	Nilai Sakip	100	88.53%	11.47%
		Nilai LPPD	100		11.47%

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran satu adalah sebagai berikut:

1.2.5.1 Indikator Kinerja Utama Pertama "Nilai SAKIP"

Penetapan Indikator Kinerja Nilai SAKIP Tahun 2017 dilaksanakan dalam rangka memaksimalkan peran kelembagaan dalam mendukung pencapaian kinerja perindustrian dan

perdagangan melalui Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan melalui Sistem tatakelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Untuk Asumsi capaian tahun 2017, diharapkan penilaian atas SAKIP OPD adalah sebesar 80 persen (atau kategori “B”).

Sebagai upaya untuk mencapai nilai tersebut diatas, langkah – langkah yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan review renstra 2016 – 2021 sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2017
2. Melakukan review terhadap penetapan indikator kinerja utama OPD Perindag Tahun 2017 sebanyak 1 (Satu) kali
3. Melakukan penjenjangan indikator kinerja mulai dari eselon III dan IV yang merupakan penjabaran indikator kinerja utama eselon II
4. Melakukan review terhadap pencapaian IKU OPD setiap triwulan pada tahun berjalan
5. Melakukan evaluasi terhadap kinerja masing – masing indikator setiap semester
6. Melakukan penyelarasan kembali terhadap RENSTRA, RENJA, RKT, TAPKIN, LAPORAN KINERJA

1.2.5.2 Indikator Kinerja Utama Kedua “ Nilai LPPD”

Penetapan Indikator Kinerja Nilai LPPD Tahun 2017 dilaksanakan dalam rangka memaksimalkan peran kelembagaan dalam mendukung pencapaian kinerja perindustrian dan perdagangan melalui Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan melalui LPPD Untuk asumsi capaian tahun 2017, diharapkan penilaian atas LPPD adalah sebesar 80 persen (atau kategori “B”).

Sebagai upaya untuk mencapai nilai tersebut diatas, langkah – langkah yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan review renstra 2016 – 2021 sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2017
2. Melakukan review terhadap indikator – indikator LPPD
3. Menyelaraskan IKU dengan Indikator LPPD
4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak guna mendukung kinerja perindustrian dan perdagangan
5. Melakukan evaluasi kekuatan sumber daya OPD Perindag secara berkala

Untuk mendukung pencapaian 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran strategis kelima, yaitu Nilai SAKIP dan Nilai LPPD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu telah menyusun 4 (empat) program yang dilaksanakan oleh Bidang sekretariat, adapun rincian programnya adalah sebagai berikut

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini didukung oleh 10 (sepuluh) kegiatan yaitu:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air & Listrik
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Penyediaan ATK
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU an
8. Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
9. Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran
10. Publikasi Media Cetak dan Elektronik

Pagu Anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.120.150.000,- dan terealisasi sebesar Rp.905.026.066 atau 80.80%.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini didukung oleh 8 (delapan) kegiatan yaitu:

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
6. Penyusunan DED Gedung Dekranasda dan Gedung Kantor
7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8. Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4

Pagu Anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.749.499.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.607.808.220 atau 91.90%.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu:

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pagu Anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.749.499.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.607.808.220 atau 91.90%.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu:

1. Koordinasi Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Urusan Perindag
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan

Pagu Anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.749.499.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.607.808.220 atau 91.90%.

5.1 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2017

5.1.1 Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu pada tahun 2017 ditargetkan mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari unit-unit penghasil yang ada di lingkungan Dinas Perindag Provinsi Bengkulu dengan target sebesar Rp. 50.000.000,- Realisasinya sebesar Rp. 57.446.250,- (114.89%). Adapun sumber / unit penghasil, dapat dilihat pada tabel 3.42 dibawah ini:

No	Sumber/Unit Penghasil	Target	Realisasi	Capaian %
1	Balai Pembinaan dan Pengawasan Mutu Barang (BPPMB)	50.000.000,-	57.446.250,-	114.89%
2	Penerimaan Lain2 (Penerimaan atas penerimaan Jasa)	-	109.000.000,-	0
	Total	50.0000.000	166.446.250	114.89%

Sumber: Sub Bagian Keuangan, Sekretariat - Disperindag Prov. Bengkulu

5.1.2 Realisasi APBD Tahun 2017

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Bengkulu pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran APBD sebesar Rp. 17.722.210.784,01, Realisasinya sebesar Rp. 15.200.490.058,- (85.77%), dengan rincian sbb :

- a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 9.492.993.784,01,- terealisasi sebesar Rp. 8.528.445.585,- (89.84%). Sisanya sebesar Rp. 3.545.969.646,- (5,96%);
- b. Belanja Langsung sebesar Rp. 8.229.217.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.672.044.473,- (81.08%) Sisanya sebesar Rp. 9.390.148.238,- (6,81%), dengan rincian sbb:
 - Belanja Pegawai Pagu sebesar Rp. 638.255.000,- Realisasi sebesar Rp. 369.534.250,- (95,12%) Sisanya sebesar Rp. 817.911.500,- (19,16%)
 - Belanja Barang dan Jasa, Pagu sebesar Rp. 6.587.762.000,- Realisasi sebesar Rp. 5.313.613.543,- (92,75%) Sisanya sebesar Rp.7.848.589.830,- (20,48%).
 - Belanja Modal, Pagu sebesar Rp. 1.003.200.000,- Realisasi sebesar Rp. 988.896.680,- (93,32%) Sisanya sebesar Rp. 861.538.924,- (21,35%), Realisasi Per Program, sebagai berikut:

Tabel 3.43 : Realisasi Anggaran APBD Per Program Tahun 2017

Program	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	%	Sisa (Juta)	%
URUSAN PERDAGANGAN					
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	271.930.000,-	109.826.500,-	40.39	162.103.500,-	59%
Program peningkatan dan pengembangan ekspor	703.000.000,-	652.150.027,-	92.77	50.849.973,-	7,2%
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	651.000.000,-	400.893.860,-	61.58	250.106.140,-	38%
URUSAN PERINDUSTRIAN					
Pengembang Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif	1.342.791.000,-	1.008.261.020,-	75.09	334.529.980,-	24%
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	1.458.582.000,-	1.278.667.527,-	87.67	179.914.473,-	12%
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	25.620.000,-	25.620.000,-	100	0,-	0%
Program Pengembangan Industri Agro	526.940.000,-	319.937.853,-	60.72	207.002.147,-	39%
URUSAN KELEMBAGAAN					
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.120.150.000,-	905.026.066	80.80	215.123.934,-	19%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.749.499.000,-	1.607.808.220,-	91.90	141.690.780,-	8%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	83.705.000,-	80.427.500,-	96.08	3.278.000,-	3%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	296.000.000,-	283.425.900,-	95.75	12.574.100,-	4%
BELANJA LANGSUNG	8.229.217.000,-	6.672.044.473,-	81.08	1.557.172.527,-	18%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.492.993.784.01	8.528.445.585,-	89.84	964.548.199,-	10%
TOTAL	17.722.210.784.01	15.366.936.308,-	86.71	2.355.274.476,-	13%

5.1.3 Realisasi APBN Tahun 2017

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase		Sisa Anggaran (Rp)
				Keu	Fisik	
1	2	3	4	5	6	7
APBN						
1	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	873.136.000	613.670.900	70.28	71.28	256.465.100
2	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	625.291.000	548.664.000	87.43	88.43	76.627.000

3	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	2.450.000.000	2.399.460.000	97.94	98.94	50.540.000
---	---	---------------	---------------	-------	-------	------------

Dalam menjalankan urusan pusat dibidang perindustrian dan perdagangan di daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu mendapatkan dana alokasi APBN Tahun Anggaran 2017 (Dekonsentrasi) sebesar Rp. 3.948.427.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.559.794.900,- (Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau sebesar 90.16 persen. Dengan Sisa lebih pelaksanaan anggaran (SILPA) sebesar Rp. 388.632.100,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah) atau sebesar 9.84 persen.

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

LAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Disperindag menuju good governance dengan mengacu pada Renstra Dinas Perindag Tahun 2016-2021. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengacu pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

LAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LAKIP menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LAKIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik

Sebagai Instansi yang bertugas membina dan mengembangkan sektor industri dan perdagangan telah mampumenjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017, secara umum sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan, walaupun masih terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama yang belum dapat mencapai target yang ditetapkan.

TUJUAN 1 Peningkatan populasi dan persebaran industry	Mendapat predikat dengan capaian rata-rata pada kategori Baik dengan rata – rata persentase capaian 85.08 persen. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran 2 (dua) sasaran yang diukur melalui 4 (empat) indikator, menghasilkan 2 (dua) indikator dengan kategori sangat baik, 1 indikator dengan kategori baik dan 1 (satu) indikator dengan kategori cukup.
TUJUAN 2 Meningkatnya kelancaran dan stabilitas sistem distribusi, pengamanan pasar dalam negeri dan perlindungan konsumen	Mendapat predikat dengan capaian rata-rata pada kategori Sangat Baik dengan rata – rata persentase capaian 105.75 persen. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran 1 (satu) sasaran yang diukur melalui 2 (dua) indikator, dengan kategori sangat baik.
TUJUAN 3 Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor	Mendapat predikat dengan capaian rata-rata pada kategori Sangat Baik dengan rata – rata persentase capaian 720.03 persen. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran 1 (satu) sasaran yang diukur melalui 3 (tiga) indikator, dengan kategori sangat baik.
TUJUAN 4	Mendapat predikat dengan capaian rata-rata pada

Peningkatan Kualitas
Kelembagaan

kategori Sangat Baik dengan rata – rata persentase capaian 100 persen. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran 1 (satu) sasaran yang diukur melalui 2 (dua) indikator, dengan kategori sangat baik

4.2 Permasalahan dan Kendala

Pencapaian kinerja sektor industri dan perdagangan menunjukkan trend perkembangan yang baik, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi sektor industri dan perdagangan sebagaimana tercermin pada beberapa indikator kinerja utama yang belum tercapai sesuai target, antara lain :

1. Persentase Pertumbuhan Industri Per tahun
2. Persentase peningkatan tenaga kerja industri

Disamping permasalahan tersebut sektor industri Bengkulu masih menghadapi masalah klasik seperti :

1. Masih minimnya hilirisasi industry berbasis sumber daya alam akibat keterbatasan SDM, Teknologi, Infrastruktur dan Permodala.
2. Ketergantungan pada bahan baku impor;
3. Keterbatasan sarana dan prasarana serta Penguasaan teknologi Industri serta Minimnya akses permodalan, perijinan, pemasaran;
4. Penerapan standarisasi produk, HKI dan sistem mutu masih kurang;
5. Hight Cost Economic yang disebabkan oleh regulasi yang kurang menguntungkan Industri Dalam Negeri seperti ketidakpastian hukum, pungli dan pajak ekspor.
6. Infrastruktur belum memadai, Kenaikan Upah Buruh (UMK), kenaikan TDL, ketidakpastian pasokan energi;
7. Beban biaya bahan baku menjadi pendorong utama kenaikan total biaya produksi industri pengolahan.
8. Kenaikan biaya bahan baku terutama didorong oleh pelemahan nilai Rupiah Terhadap US Dollar.

Sedangkan persoalan yang terkait dengan perdagangan antara lain seperti:

1. Belum efisiennya sistem logistik dan konektivitas antar daerah.
2. Belum optimalnya intensitas perdagangan antar daerah karena belum tersedianya informasi pasar antar daerah.

3. Belum stabilnya harga produk agro dikarenakan panjangnya mata rantai distribusi perdagangan.
4. Perdagangan bebas mengakibatkan membanjirnya barang barang impor yang masuk dan produk dumping ke Indonesia khususnya Bengkulu;
5. Masih lemahnya pengawasan dan pengendalian produk impor serta safeguard yang jarang digunakan;
6. Pola piki konsumen yang lebih cenderung ke produk impor;
7. Masih kurangnya diversifikasi tujuan ekspor;
8. Kurangnya Ketersediaan akses data produk dan negara tujuan ekspor;

4.3 Rekomendasi

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain :

ASPEK KELEMBAGAAN:

1. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual dibidang industri dan perdagangan.
2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target kinerja yang sudah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu akan ditingkatkan untuk secara pro aktif. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
3. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota akan dilakukan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indicator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan instansi di Provinsi maupun di Kabupaten/ Kota dan dunia usaha.
4. Agar implementasi sistem AKIP benar-benar efektif, perlu segera direalisasikan sinergisitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu

- kesatuan ,sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan out put maupun out come kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergisitas tersebut, kinerja organisasi yang dibiayai melalui dana APBD benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.
5. Menjadikan SAKIP ukuran kinerja organisasi secara nyata dan akuntabel, dengan menerapkan fungsi reward and punishment yang tegas dan ketat.

ASPEK URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1. Pembangunan industri-industri pendukung yang mengolah bahan baku dalam kuantitas, kualitas dan harga yang bersaing.
2. Pemetaan dan pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dari daerah lain di luar Bengkulu sebagai alternatif pengganti barang barang impor (substitusi impor).
3. Memacu pertumbuhan industry menggunakan bahan baku lokal guna menekan impor dan mencegah defisit neraca perdagangan serta bersinergi dgn stakeholders dalam menyukseskan program hilirisasi industri yang tengah diupayakan pemerintah utamanya produk agro.
4. Melakukan pembinaan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah secara berkelanjutan.
5. Membuka akses pasar IKM yang lebih luas melalui pemanfaatan digital marketing guna mendorong IKM dengan produk berorientasi ekspor.
6. Mendorong pengembangan industri kreatif daerah berbasis kearifan lokal guna mendorong kreatifitas IKM dan menambah nilai tambah produk daerah.
7. Menyelesaikan segera permasalahan yang menghambat daya saing industri manufaktur seperti infrastruktur, regulasi yang membuat hight cost economic, Upah Buruh, kenaikan TDL, dll.
8. Membuat standarisasi/SNI diberlakukan dengan ketat/law enforcement harus ditegakkan serta Perusahaan yang tingkat kandungan dalam negerinya tinggi harus diberi apresiasi/insentif;
9. Ketersediaan informasi dan kebijakan impor yang kondusif dalam rangka pengendalian impor serta memperketat pengawasan impor di Bengkulu.
10. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan Atase Perdagangan, ITPC diluar negeri dan KADINDA Bengkulu untuk menawarkan kepada investor/perusahaan asing untuk berinvestasi di Bengkulu..